



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 50 DAN 55 (REVISI 2006)  
ATAS *IMPAIRMENT* PIUTANG  
PADA PERUSAHAAN *MULTIFINANCE***

**SKRIPSI**

**Emanuela  
1006811791**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 50 DAN 55 (REVISI 2006)  
ATAS *IMPAIRMENT* PIUTANG  
PADA PERUSAHAAN *MULTIFINANCE***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi**

**Emanuela  
1006811791**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Emanuela

NPM : 1006811791

Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Juli 2012



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Emanuela  
NPM : 1006811791  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi  
Bahasa Indonesia : Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)  
atas *Impairment* Piutang pada Perusahaan  
*Multifinance*  
Bahasa Inggris : *Analysis of Application PSAK 50 and 55 (Revised  
2006) of Impairment of Receivables in Financing  
Company*

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Dwi Martani S.E., Ak. (  )

Penguji : Dodik Siswantoro S.E., M.Sc. Acc (  )

Penguji : Debby Fitriyani S.E., MSM. (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 9 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi

Sri Nurhayati, M.M., SAS.  
NIP : 19600317 198602 2001

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Drs. Dwi Martani, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Cecillia Sumarah Widhiastuti dan Sidarta Damar Surya Sentosa, sebagai orang tua, Imanuel dan Christian, sebagai adik (malaikat hidup saya) serta seluruh keluarga besar Soeharto dan keluarga besar Maruto yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (3) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Fega, Aziz, Ina, Ningsih, Bunga, Debora, Dara, Dinda, Ani dari FEUI; Dea, Arinda, Sawi, Ika, Fera, Kinanti dari SMUN 44; Irawan, Cendy, Bobie, Naomi, Suci, Adri, Iqbal, Vlado, Lisha, Yuvie, Budi, Wongso, Yani, Dida, Fayko, Isa, Agil, Ardi, Wida, Steffy dari Backpacker Indonesia, teman-teman DFK International, teman-teman Manulife Financial serta teman-teman GPIB Menara Iman

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Tiada gading yang tak retak, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emanuela  
NPM : 1006811791  
Program Studi : S1  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Skripsi

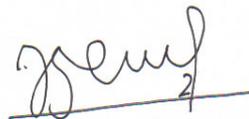
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) atas *Impairment* Piutang  
pada Perusahaan *Multifinance***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal: 9 Juli 2012  
Yang menyatakan



(Emanuela)

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Emanuela  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Penerapan PSAK No. 50 Dan 55 (Revisi 2006)  
Terhadap Penurunan Nilai Piutang Pada Perusahaan  
*Multifinance*

Skripsi ini membahas analisis penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) terhadap penurunan nilai piutang pada perusahaan *multifinance*. PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) merupakan standar yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, salah satunya adalah piutang. Standar akuntansi baru ini memperkenalkan perhitungan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individu atau secara kolektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel 10 perusahaan *multifinance* yang *listed* di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menyarankan Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menentukan metode yang harus dipakai untuk menghitung penurunan nilai piutang.

Kata kunci:

Instrumen keuangan, penurunan nilai piutang, PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

## ABSTRACT

Name : Emanuela  
Study Program : Accounting  
Title : Analysis of Application No. PSAK 50 and 55 (Revised 2006) of Impairment of Receivables in Financing Company

This thesis discusses about analysis application of PSAK 50 and 55 (Revised 2006) to impairment of receivable in financing companies. PSAK 50 and 55 (Revised 2006) is a standard that governs the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial instruments, including account receivable. These new accounting standards introduced impairment calculation of receivables based on individual assessment or collective. This research is qualitative descriptive qualitative. This research took 10 samples of multifinance companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2009 and 2010. The researcher suggest the Financial Accounting Standards Board to determine which method should be used to calculate the impairment of receivables.

Key words:

Financial instruments, impairment of receivables, PSAK 50 and 55 (Revised 2006)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKAS KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Perusahaan Pembiayaan	
2.1.1 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia .....	8
2.1.2 Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan .....	8
2.1.3 Jumlah Perusahaan Pembiayaan di Indonesia .....	10
2.1.4 Posisi Keuangan Industri Jasa Pembiayaan di Indonesia .....	12
2.1.5 Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan .....	13
2.2 PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) .....	13
2.2.1 Tujuan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) .....	14
2.2.2 Aset Keuangan .....	15
2.2.3 Nilai Wajar Aset Keuangan .....	17
2.2.4 Pengukuran Aset Keuangan .....	18
2.3 Piutang dan Penurunan Nilai Piutang	
2.3.1 Landasan Teori Piutang dan Penurunan Piutang .....	19
2.3.2 Akuntansi Piutang dan Penurunan Nilai Piutang .....	22
2.4 Penelitian Sebelumnya .....	28
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Metodologi Penelitian .....	33
3.1.1 Metode Pemilihan Sampel .....	33
3.1.2 Metode Pengambilan Data .....	35
3.2 Metode Analisis .....	36
3.3 Riset	
3.3.1 Riset / Analisis Nilai Piutang .....	36
3.3.2 Riset / Analisis Hasil Penyajian .....	37

<b>BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Analisis Umum .....	46
4.2 Analisis Hasil Penyajian .....	47
4.2.1 Analisis Penyajian pada Laporan Posisi Keuangan .....	49
4.2.2 Analisis Penyajian pada Laporan Laba Rugi Komprehensif .....	50
4.2.3 Analisis Penyajian pada Laporan Perubahan Ekuitas di Laporan Keuangan tahun 2010 .....	53
4.2.4 Analisis Pengungkapan pada Laporan Catatan atas Laporan Keuangan .....	54
4.3 Analisis Dampak Penerapan PSAK 50 Dan 55 (Revisi 2006) .....	64
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	66
5.1.1 Penyajian Penurunan Piutang Pembiayaan pada Laporan Posisi Keuangan .....	66
5.1.2 Penyajian Penurunan Piutang Pembiayaan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif .....	67
5.1.3 Penyajian Penurunan Awal PSAK 55 (revisi 2006) pada Laporan perubahan ekuitas di laporan keuangan tahun 2010 .....	67
5.1.4 Pengungkapan Kebijakan dan Prinsip Penurunan Piutang pada Catatan atas Laporan Keuangan .....	68
5.1.5 Dampak Penerapan PSAK 55 (revisi 2006) Pada Kinerja Perusahaan .....	70
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ilustrasi perhitungan menggunakan metode <i>Roll-Rate Model</i>	25
Tabel 2.2	Ilustrasi perhitungan menggunakan metode <i>Average Charge-Off Method</i>	27
Tabel 2.3	Persentase perusahaan yang mengkapkan informasi tambahan tentang penurunan nilai signifikan dari aset di Republik Serbia di Periode 2007-2009	30
Tabel 3.1	Nama Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 31 Desember 2010	35
Tabel 3.2	Contoh penyajian piutang pembiayaan konsumen dan cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan	38
Tabel 3.3	Contoh pengungkapan penurunan nilai piutang dalam laporan laba rugi komprehensif dan penjelasan atas informasi signifikan	40
Tabel 3.4	Contoh penyajian laporan perubahan ekuitas sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	41
Tabel 3.5	Contoh daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo	43
Tabel 3.6	Contoh umur piutang - sesuai jumlah hari tunggakan	43
Tabel 3.7	Contoh Mutasi / Perubahan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	44
Tabel 4.1	Persentase piutang terhadap aset perusahaan pembiayaan per tanggal 31 Desember 2009 dan 2010	46
Tabel 4.2	Jumlah piutang masing-masing kegiatan pada perusahaan pembiayaan	48
Tabel 4.3	Penyajian piutang pembiayaan dan cadangan penurunan nilai pada laporan posisi keuangan tahun 2009 dan 2010	49
Tabel 4.4	Klasifikasi beban dan pemulihan penurunan piutang pada perusahaan pembiayaan tahun 2009 dan 2010	51
Tabel 4.5	Pengungkapan klasifikasi pemulihan penurunan nilai piutang pada CALK	52
Tabel 4.6	Tabel mutasi penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen	55
Tabel 4.7	Kebijakan Akuntansi Instrumen Keuangan	56
Tabel 4.8	Pengungkapan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan perusahaan pembiayaan tahun 2010	57
Tabel 4.9	Jumlah Perusahaan yang mengungkapkan informasi tambahan	59
Tabel 4.10	Identifikasi kata dan metode penurunan nilai piutang	62
Tabel 4.11.	Pengungkapan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan perusahaan	63
Tabel 4.12.	Persentasi cadangan penurunan piutang terhadap nilai piutang – kotor	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Jumlah Perusahaan Pembiayaan (2006 – 2010)	11
Gambar 2.2.	Aset, Kewajiban dan Ekuitas Industri Jasa Pembiayaan	12
Gambar 2.3.	Pengukuran Aset Keuangan	18
Gambar 2.4.	Kerangka Berpikir Cadangan Penurunan Piutang Pembiayaan	22
Gambar 2.5.	Struktur Rugi Penurunan Republik Serbia pada Periode 2007-2009	31
Gambar 4.1	Penyajian penyesuaian penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2010	53



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1980-an, telah terjadi perdebatan dan kritik terhadap standar akuntansi yang mengatur perlakuan terhadap instrumen keuangan (*financial instrument*) pada waktu itu, yang menginginkan pengakuan dan pengungkapan yang lebih banyak akan nilai wajar (*fair value*) dari instrumen keuangan (Jones, 1988). Pengukuran instrumen keuangan dengan pendekatan biaya historis (*historical cost*) dianggap sudah tidak lagi dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dengan semakin kompleksnya instrumen keuangan (Jones, 1988), dalam hal ini perusahaan *multifinance*.

Pada bulan September 2006, Ikatan Akuntansi Keuangan (IAI) mengeluarkan *exposure draft* (ED) PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) tentang instrumen keuangan, yang merupakan adopsi dari IAS 32 dan IAS 39 yang telah diamandemen. PSAK 55 (revisi 2006) memperkenalkan “pilihan nilai wajar” (*fair value option*), dimana perusahaan diperbolehkan untuk mengukur instrumen keuangan diluar untuk keperluan *trading*, dengan nilai wajar. Estimasi nilai wajar dari aset keuangan tanpa kuotasi harga di pasar ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga efektif.

PSAK 50 mengatur tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan sementara itu PSAK 55 mengatur tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Batas implementasi kedua PSAK tersebut adalah 1 Januari 2009. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 30 Desember 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengeluarkan surat pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 yang berisikan bahwa DSAK IAI mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam paragraf 95 dan PSAK 55 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam paragraf 107, yang semula berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 diubah menjadi untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

Pengertian dari perusahaan Pembiayaan (sering disebut perusahaan *multifinance*) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Dalam pasal 2 huruf dijelaskan bahwa bentuk kegiatan usaha dari perusahaan *multifinance* antara lain:

1. Sewa Guna Usaha;
2. Anjak Piutang;
3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen.

Hal yang cukup krusial dari PSAK 50 & 55 (revisi 2006) bagi perusahaan pembiayaan adalah bahwa, piutang pembiayaan sebagai aset keuangan perusahaan digolongkan pada "*Loan and Receivables*" yang valuasinya adalah dengan cara *amortized cost*. Hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai piutang pembiayaan pada perusahaan *multifinance* akan dipengaruhi oleh proyeksi *cashflow* dari aset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya (kredit yang dikururkan).

Selain itu sistem akuntansi baru ini memperkenalkan "*impairment*" atau penurunan atas nilai atas piutang. Penurunan nilai piutang dapat dihitung dengan 2 cara, yaitu secara individu dan dihitung secara kolektif. Perhitungan penurunan nilai secara individu sifatnya memperhitungkan kasus per kasus berdasarkan probabilitas suatu kredit menjadi *default*. Sedangkan perhitungan secara kolektif adalah perhitungan penurunan nilai aset keuangan yang signifikan tetapi secara individual tidak mengalami penurunan nilai. Jadi, kredit yang kualitasnya baik yaitu yang kelancaran pembayaran dan prospek usaha dinilai baik akan memperkecil jumlah penurunan nilai, sementara disisi lain kredit yang kualitasnya kurang baik akan menjadi semakin besar penurunan nilainya.

Menurut Wahlen, James M. (1994), sebuah komponen kunci dari penilaian saham perusahaan adalah penilaian risiko *default* (gagal tagih) pada portofolio pinjaman. Selain itu laporan keuangan perusahaan harus memberikan tiga pengungkapan terkait tetapi berbeda dari risiko kredit, yaitu: perubahan dalam kredit macet, kerugian pinjaman dan penurunan nilai pinjaman. Penelitian Wahlen, James M. (1994) menunjukkan laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan memiliki kontribusi dalam membantu pasar (investor dan calon investor) pada proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, Penulis mencoba meneliti bagaimana perusahaan pembiayaan menerapkan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) tidak hanya dilihat dari segi pengakuan dan pengukuran tetapi juga dari segi penyajian dan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan catatan atas laporan keuangan. Berbagai kejadian bisa terjadi dalam periode pelaporan, seperti penurunan nilai pasar dari aset, kerusakan fisik aset, keusangan aset atau kejadian lain yang dapat mengakibatkan penurunan nilai aset perusahaan. Jika peristiwa semacam itu menyebabkan penurunan nilai aset, perusahaan harus menurunkan nilai tercatat menuju jumlah yang dapat terpulihkan. Jika tidak, aset perusahaan akan disajikan dalam nilai tercatat melebihi nilai yang sejati dapat terpulihkan, hal ini dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan mengambil keputusan yang salah. Atas dasar itu laporan keuangan harus menyajikan hasil transaksi dan memberikan informasi yang benar dan adil tentang posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas.

Andrić, *et al* (2011), dalam studinya yang didasarkan pada sampel dari 225 laporan keuangan perusahaan berukuran besar dan menengah di Republik Serbia untuk periode 2007-2009, menggambarkan peningkatan jumlah persentase perusahaan yang mengungkapkan kerugian penurunan nilai. Dari hasil penelitian tersebut, kerugian penurunan nilai piutang merupakan bagian terbesar dibandingkan akun lain dalam komponen aset perusahaan. Pada tahun 2009 di Republik Serbia, kerugian penurunan nilai aset perusahaan yang berasal dari piutang dan investasi jangka pendek sebesar 64%, persediaan 26%, disusul

dengan investasi jangka panjang 15% serta penurunan nilai aset tetap, aset tidak berwujud dan aset biologis masing-masing dibawah 10%.

Masih pada penelitian Andrić, *et al* (2011), disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah perusahaan di Republik Serbia yang mengungkapkan penurunan nilai aset pada periode 2007-2009. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 44% dari perusahaan di tahun 2007 tidak mengungkapkan adanya penurunan nilai aset, 26% pada tahun 2008 dan 21% pada tahun 2009. Sebuah hasil tambahan dari penelitian ini adalah pada tahun 2008 dan 2009, 1% dari perusahaan membuat pengungkapan yang tidak memadai terkait penurunan nilai aset. Perusahaan tersebut tidak mengungkapkan penurunan nilai aset dibagi ke dalam kelas aset apa, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku di Republik Serbia.

Penelitian Andrić, *et al* (2011) menjadi salah satu acuan untuk meneliti sejauh mana pengungkapan penurunan nilai piutang khususnya piutang pembiayaan pada perusahaan *multifinance* di Indonesia setelah berlakunya PSAK 50 & 55 (revisi 2006) yang diterapkan efektif 1 Januari 2010. Penulis akan membandingkan bagaimana pengungkapan penurunan nilai piutang pembiayaan pada laporan keuangan sebelum penerapan PSAK 50 & 55 revisi 2006 (laporan keuangan tahun 2009) dan setelah penerapan PSAK 50 & 55 revisi 2006 (laporan keuangan tahun 2010). Apakah ada kenaikan persentase yang signifikan dalam hal pengungkapan penurunan nilai piutang pada perusahaan pembiayaan di Indonesia seperti penelitian yang dilakukan Andrić, *et al* (2011) di Republik Serbia?

## 1.2 Identifikasi Masalah

Penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) merupakan fase baru dari perlakuan akuntansi instrumen keuangan karena memuat beberapa perubahan yang cukup signifikan, khususnya memberikan porsi lebih pada akuntansi nilai wajar (*fair value accounting*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan

dan terkait dengan keterbatasan data yang penulis miliki, maka penulis merumuskan masalah skripsi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan *multifinance* di Indonesia secara umum sudah menerapkan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) untuk penurunan piutang sehingga meningkatkan relevansi dan reliabilitas laporan keuangan?
2. Seberapa besar dampak yang timbul akibat munculnya penurunan piutang hasil dari penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) bagi kinerja perusahaan pada industri *multifinance*?

Beberapa masalah akuntansi yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya mengenai beberapa metode atau cara perhitungan penurunan piutang pembiayaan, pilihan nilai wajar (*fair value option*), penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) serta analisis penerapan tersebut bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia secara umum.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini ditujukan agar dapat diperoleh pemahaman akan:

1. Penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) pada perusahaan pembiayaan dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan penurunan piutang.
2. Memberikan gambaran mengenai dampak yang timbul akibat munculnya penurunan piutang hasil dari penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) bagi kinerja perusahaan pada industri *multifinance*.

### **1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada sampel dari 12 laporan keuangan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum penerapan PSAK 50 & 55 revisi 2006 (tahun 2009) dan setelah penerapan (tahun 2010). Penelitian yang dilakukan mencakup pembahasan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan penurunan piutang.

Pembahasan ini menjelaskan bagaimana proses dan cara perhitungan perusahaan pembiayaan dalam mengestimasi nilai penurunan piutang dengan pendekatan metode nilai wajar yang kemudian akan disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan. Penulis mengumpulkan data dan informasi sekunder, seperti laporan keuangan perusahaan (*financial statement*), laporan tahunan (*annual report*), laporan audit (*audited report*) serta informasi lainnya atas perusahaan *multifinance* yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Kemudian melakukan penelitian yang meliputi metode perhitungan, pengungkapan & penyajian, pengakuan & pengukuran dan dampak yang timbul akibat penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) karena adanya penurunan nilai piutang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan beberapa pengertian mengenai perkembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia, teori mengenai PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006), piutang dan penurunan piutang dan penelitian sebelumnya. perkembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia meliputi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia, posisi keuangan industri jasa pembiayaan di Indonesia dan sumber dana pembiayaan di Indonesia. Teori mengenai PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) meliputi tujuan, aset keuangan, nilai wajar aset keuangan, pengukuran aset keuangan. Teori mengenai piutang dan penurunan piutang yang meliputi landasan teori dan perlakuan akuntansi.

**BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

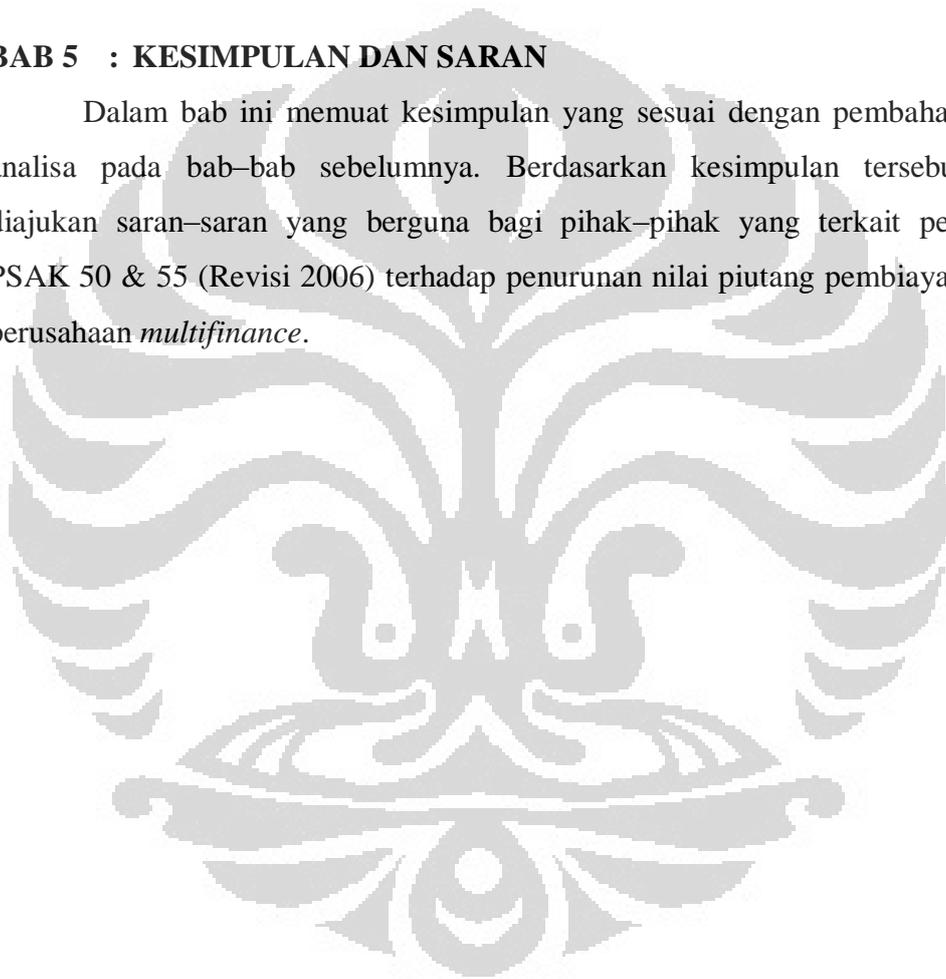
Bab ini meliputi jenis dan metodologi penelitian, metode pemilihan sampel, metode pengambilan data, metode analisa dan riset.

**BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan meliputi pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan analisa serta interpretasi hasil penelitian.

**BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut akan diajukan saran-saran yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait penerapan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) terhadap penurunan nilai piutang pembiayaan pada perusahaan *multifinance*.



## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Perusahaan Pembiayaan

##### 2.1.1 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia

Industri pembiayaan pada tahun 2010 telah menjadi salah satu industri yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Industri pembiayaan yang sudah lama berkembang di Indonesia berhasil melewati beberapa kali guncangan krisis ekonomi sehingga menarik minat banyak investor baru. Skema bisnis yang didasari oleh *underlying asset*, dekatnya jaringan industri pembiayaan dengan industri manufaktur, distributor dan pemegang merek tunggal, serta mudah dan cepatnya pelayanan, membuat industri pembiayaan lebih dekat ke konsumennya dibandingkan industri pemberi kredit sejenis.

Dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas industri ini, pembina dan pengawas industri pembiayaan mewajibkan minimum modal disetor (*paid up capital requirement*) Rp 100 miliar untuk perseroan dan Rp 50 miliar untuk koperasi. Sampai dengan saat ini telah banyak perusahaan pembiayaan yang modal disetornya di bawah ketentuan minimum tersebut mulai terpacu untuk meningkatkan modalnya untuk bersaing dan bersiap diri apabila menghadapi guncangan-guncangan krisis ekonomi yang mungkin terjadi di masa datang. Selain itu, Perusahaan Pembiayaan juga diwajibkan memiliki rasio pinjaman terhadap modal sendiri (*gearing ratio*) maksimal sebesar 10 kali dan rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (*investment asset ratio*) minimal sebesar 40%.

##### 2.1.2 Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

1. Sewa Guna Usaha;
2. Anjak Piutang;
3. Usaha Kartu Kredit
4. Pembiayaan Konsumen.

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain:

#### **1. Sewa Guna Usaha**

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

#### **2. Anjak Piutang**

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek (piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang, dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa

jaminan dari penjual piutang (*Without Recourse*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With Recourse*).

Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without recourse*) adalah kegiatan anjak piutang dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya Piutang. Sedangkan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With recourse*) adalah kegiatan anjak piutang dimana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.

### **3. Usaha Kartu Kredit**

Kegiatan Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

### **4. Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen antara lain: pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan.

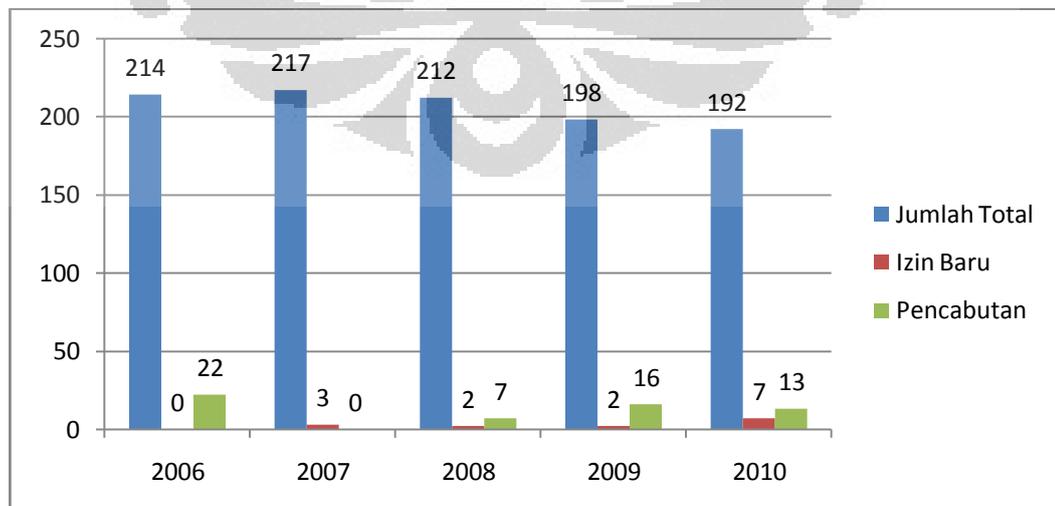
#### **2.1.3 Jumlah Perusahaan Pembiayaan di Indonesia**

PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan telah menitikberatkan pada penguatan struktur modal perusahaan pembiayaan, pengurangan risiko pinjaman dan penguatan efisiensi aset. Tiga hal pokok tersebut antara lain telah menjadi acuan Bapepam-LK dalam penerbitan izin usaha baru dan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi

ketentuan. Sejak tahun 2006, tercatat 14 (empat belas) izin usaha perusahaan pembiayaan telah diterbitkan dan 58 (lima puluh delapan) izin usaha telah dicabut.

Sepanjang tahun 2010, Bapepam-LK telah menerbitkan 7 (tujuh) izin usaha baru dan mencabut 13 (tiga belas) izin usaha perusahaan pembiayaan, sehingga jumlah total perusahaan pembiayaan pada akhir tahun 2010 adalah sebanyak 192 perusahaan, menurun dari total 198 perusahaan di akhir tahun 2009. Namun demikian, pencabutan sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan Bapepam-LK tidak serta merta mengurangi pertumbuhan aset industri jasa pembiayaan, sebaliknya menciptakan industri jasa pembiayaan yang ada semakin kuat dan sehat dengan manajemen risiko yang lebih baik. Hal ini tercermin pada penyebaran jumlah perusahaan berdasarkan kategori kepemilikan aset selama 5 tahun terakhir. Meskipun jumlah perusahaan dengan kategori aset di bawah Rp 100 miliar dan antara Rp 100 miliar s.d. Rp 500 miliar masih mendominasi, selama 5 tahun terakhir telah terjadi peningkatan pada jumlah Perusahaan Pembiayaan dengan nilai aset yang lebih besar. Selanjutnya untuk tahun 2010, 53% dari total aset industri terkonsentrasi pada 9 perusahaan dengan kepemilikan aset di atas Rp 5 triliun, yaitu senilai Rp 123,1 triliun. Perusahaan beraset antara Rp 1 triliun s.d. Rp 5 triliun menguasai Rp 58,8 triliun, sekitar 70.1 % dari total aset industri.

Gambar 2.1. Jumlah Perusahaan Pembiayaan (2006 – 2010)



Sumber: BAPEMPAM - Laporan Keuangan 2010 Perusahaan Pembiayaan

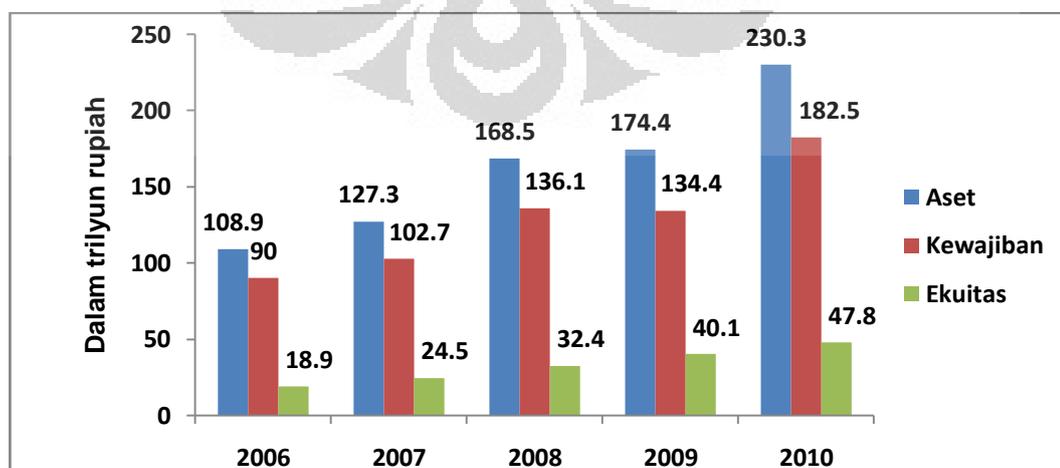
### 2.1.4 Posisi Keuangan Industri Jasa Pembiayaan di Indonesia

Meskipun jumlah Perusahaan Pembiayaan turun, industri jasa pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini antara lain diindikasikan oleh meningkatnya jumlah aset yang dimiliki oleh industri jasa Pembiayaan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2010, aset industri jasa pembiayaan telah tumbuh sebesar 32,02% dibandingkan tahun 2009. Sementara itu, dalam lima tahun terakhir, total aset industri jasa Pembiayaan meningkat sangat pesat dari Rp 108,9 triliun di tahun 2006 menjadi sebesar Rp 230,3 triliun di tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,2% per tahun. Dengan demikian, angka pertumbuhan di tahun 2010 lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun. Hal ini dimungkinkan karena perekonomian Indonesia tahun 2010 yang membaik.

Sementara itu, dalam lima tahun terakhir, modal sendiri Perusahaan Pembiayaan meningkat dari Rp 18,9 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 47,8 triliun dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 26,2% pertahun, mencerminkan bahwa kepercayaan investor terhadap industri pembiayaan terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Gambar 2.2. Aset, Kewajiban dan Ekuitas Industri Jasa Pembiayaan



Sumber: BAPEMPAM - Laporan Keuangan 2010 Perusahaan Pembiayaan

### 2.1.5 Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya maupun obligasi. Untuk itu, kepercayaan investor terhadap industri pembiayaan sangat perlu dijaga. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan antara lain mempertahankan nilai piutang pembiayaan minimal sebesar 40% dari total aset, nilai ekuitas minimal 50% dari modal disetor dan gearing ratio maksimal 10 kali, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Perusahaan Pembiayaan yang pada akhirnya diharapkan dapat menjaga kepercayaan konsumen, investor, kreditor dan masyarakat terhadap industri ini. Pada tahun 2010, sumber dana Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh pinjaman yang diterima dari sektor perbankan, yaitu sekitar 64%.

### 2.2 PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

Efektif tanggal 1 Januari 2010, laporan keuangan perusahaan di Indonesia menerapkan PSAK revisi berikut ini:

- PSAK 50 (revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.
- PSAK 55 (revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

PSAK 50 (revisi 2006) menghasilkan pengungkapan instrumen keuangan yang lebih luas termasuk beberapa pengungkapan kualitatif yang berkaitan dengan risiko keuangan dan tujuan perusahaan.

PSAK 55 (revisi 2006) memberikan panduan pada pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dan kontrak untuk membeli item non-keuangan. Antara lain, pada tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan harus melakukan klasifikasi atas aset dan kewajiban keuangan yang dimilikinya dan perhitungan metode suku bunga efektif ketika aset atau kewajiban diukur pada biaya perolehan diamortisasi (amortized cost) yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat

penerapan awal PSAK ini ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK ini sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut. Selain itu, PSAK ini juga mengubah cara Perusahaan dalam mengukur penurunan nilai aset keuangan tergantung pada klasifikasi instrumen keuangan. Karena PSAK ini diterapkan secara prospektif, penerapan awal tidak memiliki pengaruh atas jumlah yang dilaporkan di tahun 2009, apabila ada kerugian penurunan nilai aset keuangan maka dibebankan ke saldo laba sebagai penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006). Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis No. 4, Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006).

### **2.2.1 Tujuan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)**

Tujuan diterbitkannya PSAK 50 (Revisi 2006) adalah menentukan prinsip penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, sebagai liabilitas atau ekuitas, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini juga membantu perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, termasuk juga klasifikasi yang terkait dengan bunga, dividen, kerugian dan keuntungan dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus.

Tujuan diterbitkannya PSAK 55 (Revisi 2006) adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Selain kedua PSAK yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini, telah terbit juga PSAK 60 (Revisi 2010) mengenai Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Tujuan terbitnya PSAK 60 (Revisi 2010) adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi:

- Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan

- Sifat dan luas resiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana akan perusahaan sajikan selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola resiko tersebut

### 2.2.2 Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) atau pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari sifat dan tujuan perolehan aset keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

#### 1. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok

diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan apabila:

Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang termasuk dalam kategori ini harus memenuhi salah satu kondisi berikut:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.
- merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek.
- merupakan derivatif.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau kewajiban atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi

Perusahaan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau

- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau kewajiban) ditetapkan sebagai FVTPL.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

## **2. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)**

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai intense positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

## **3. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual**

Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian pada perubahan pada nilai wajarnya dilaporkan pada komponen yang terpisah pada

ekuitas sampai pada saat aset keuangan tersebut diselesaikan dan akumulasi keuntungan dan kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar sebagai hasil dari perhitungan ulang biaya amortisasi pada mata uang moneter aset keuangan tersedia untuk dijual serta pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui pada laporan laba rugi.

#### 4. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

#### 2.2.3 Nilai Wajar Aset Keuangan

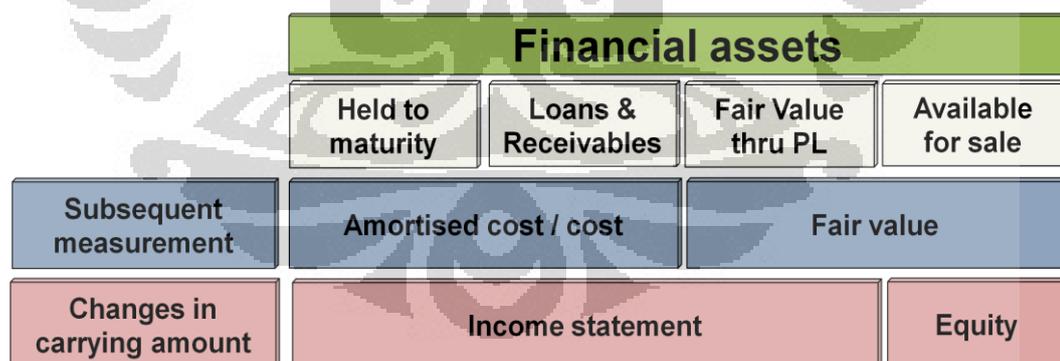
Setiap perusahaan harus melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimilikinya berdasarkan hirarki berikut:

- Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk instrumen yang serupa. Untuk aset keuangan yang dimiliki, nilai wajar yang digunakan adalah *bid price* (harga penawaran). Sedangkan untuk kewajiban keuangan yang dimiliki, nilai wajar yang digunakan adalah *ask price* (harga permintaan). Jika instrument keuangan tersebut tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif, maka digunakan teknik penilaian dalam menentukan nilai wajarnya.

- Teknik penilaian yang berdasarkan pada input yang dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai menggunakan: harga kuotasi pada pasar aktif untuk instrumen yang serupa; harga kuotasi untuk instrumen serupa pada pasar yang dianggap kurang aktif; atau teknik penilaian dimana semua input yang signifikan didapatkan secara langsung atau tidak langsung dari data pasar yang diobservasi.
- Teknik penilaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah semua instrumen dimana input untuk teknik penilaian yang digunakan tidak berdasarkan pada data yang dapat diobservasi dan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi memiliki dampak yang signifikan terhadap penilaian instrumen. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen serupa dimana penyesuaian atau asumsi yang tidak dapat diobservasi secara signifikan diperlukan untuk menggambarkan perbedaan antara instrumen-instrumen yang ada.

#### 2.2.4 Pengukuran Aset Keuangan

Gambar 2.3. Pengukuran Aset Keuangan



Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diolah oleh Penulis

Pada saat pengakuan awal (*initial measurement*), entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut, misalnya *fee and commission*. Adapun untuk pengukuran selanjutnya

(*subsequent measurement*), entitas mengukur aset keuangan, gambar 2.3., berdasarkan 4 kategori klasifikasi aset keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk instrumen keuangan seperti HTM dan *Loans and Receivables*, biaya transaksi dimasukkan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan selanjutnya akan diamortisasi melalui laporan laba rugi sepanjang umur instrumen tersebut. Untuk AFS, biaya transaksi diakui dalam ekuitas sebagai bagian dari perubahan nilai wajar pada penilaian kembali.

## 2.3 Piutang dan Penurunan Nilai Piutang

### 2.3.1 Landasan Teori Piutang dan Penurunan Piutang

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan (“peristiwa merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Baik aset maupun kewajiban diakui pada neraca jika memiliki kemungkinan ekonomi dimasa depan (*probable economic value*) dan dapat diandalkan pengukurannya (*measurement reliability*). PSAK 55 (revisi 2006) memberikan penekanan lebih pada ‘bukti yang obyektif (*objective evidence*)’ yang menjadi dasar dari penurunan nilai tersebut (paragraph 60) dan juga penekanan bahwa evaluasi akan adanya penurunan tersebut harus dilakukan pada setiap tanggal neraca (paragraph 59). Aset keuangan dikatakan mengalami *impairment* dan terdapat kerugian akibat penurunan nilai ini, jika dan hanya jika, terdapat ‘bukti yang obyektif (*objective evidence*)’ mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset.

Aset keuangan yang dijadikan topik dalam laporan ini adalah piutang pembiayaan. Untuk piutang pembiayaan, nilai wajarnya adalah total kas yang dipinjamkan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya lainnya. Jika terjadi peristiwa yang merugikan pada pinjaman tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan sehingga sulit untuk diestimasi secara andal, maka dapat dikatakan bahwa pinjaman tersebut telah menurun nilainya.

Pada kenyataannya, sulit untuk mengidentifikasi suatu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. Secara garis besar, tiga hal kunci dibawah ini terkait dengan penurunan nilai:

### **1. Terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai atas aset keuangan**

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, perlu bukti objektif untuk mengetahui adanya penurunan nilai. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan entitas dalam menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi mengenai:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak debitur / pihak penerbit / pihak peminjam
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga
- Restrukturisasi atau keringanan (konsesi) akibat pihak peminjam mengalami kesulitan
- Peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan
- Penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individu dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - memburuknya status pembayaran pihak peminjam
  - kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi
  - Rasio likuiditas dan solvabilitas pihak debitur / pihak penerbit / peminjam

Faktor-faktor ini dan faktor lainnya, baik secara individual maupun secara bersama dapat menjadi bukti objektif yang cukup bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan.

## 2. Jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dan nilai kerugian

Terdapat tiga cara menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai aset keuangan berdasarkan jenisnya yang dibagi menjadi seperti berikut ini:

### - *Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi*

Kategori aset keuangan ini mencakup *Loans and Receivables* dan *Held to Maturity Investments*. Jumlah kerugian pada kategori aset ini diukur dengan cara mengurangi nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut pada nilai tercatat aset. Atau dengan kata lain, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Carrying amount} - \text{Estimated future cash flows discounted using original effective rate}$$

Jika pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, maka kerugian sebelumnya harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Akan tetapi, pemulihan (*reversal*) ini tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Piutang pembiayaan, yang menjadi bahasan pada makalah ini, diklasifikasikan pada aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

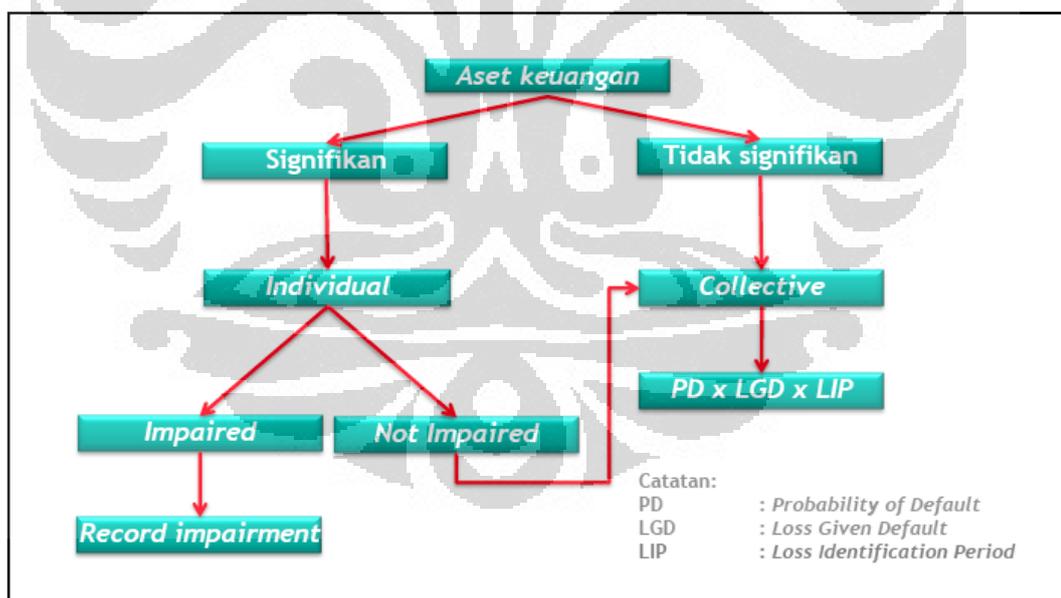
## 3. Kerugian dicatat pada laporan laba rugi

Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.

### 2.3.2 Akuntansi Piutang dan Penurunan Nilai Piutang

PSAK 55 (Revisi 2006) mewajibkan adanya estimasi penurunan nilai aset keuangan atau disebut juga sebagai *impairment*. Untuk perusahaan pembiayaan, estimasi ini disebut Cadangan Penurunan Piutang Pembiayaan (CPPP). CPPP dihitung atas dasar nilai tercatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*). Sesuai dengan Pedoman Aplikasi PSAK 55 (Revisi 2006), proses estimasi terhadap jumlah kerugian penurunan nilai dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran (*range*) nilai kerugian yang mungkin terjadi. Perusahaan pembiayaan harus mengakui kerugian akibat penurunan nilai sebesar estimasi terbaik dalam kisaran tersebut dengan mempertimbangkan seluruh informasi relevan yang tersedia sebelum laporan keuangan diterbitkan mengenai kondisi yang terjadi pada tanggal neraca. Kerangka berpikir untuk menghitung CPPP adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir Cadangan Penurunan Piutang



Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diolah kembali oleh Penulis

Dari gambar 2.4., aset keuangan pada perusahaan pembiayaan antara lain kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, aset lain-lain (investasi sewa

pembiayaan), tagihan anjak piutang, piutang lain-lain (piutang karyawan, piutang klaim asuransi, piutang bunga deposito), derivatif untuk tujuan manajemen resiko serta investasi dalam saham. Terdapat pula aset keuangan yang tidak dilakukan pencadangan karena dianggap tidak mengalami penurunan nilai.

Pertama-tama, piutang pembiayaan sebagai salah satu aset keuangan yang memiliki potensi penurunan nilai, diidentifikasi secara individual apakah piutang tersebut memiliki bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Jika setelah dilakukan evaluasi individual terdapat bukti obyektif bahwa memang benar piutang tersebut mengalami penurunan nilai, maka penurunan nilainya dicatat sebagai CPPP. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Apabila tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas piutang yang dinilai secara individual, piutang tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan penurunan nilai dihitung secara kolektif. Penurunan nilai kolektif aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya diperoleh dan diamortisasi meliputi:

- Kelompok aset keuangan sejenis yang tidak signifikan secara individual
- Aset keuangan yang signifikan secara individual yang tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individu.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Perusahaan harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).

- *Loss given default* ("LGD") – Perusahaan mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Perusahaan apabila terjadi tunggakan fasilitas kredit / pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah hutang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model Perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Loss identification period* ("LIP") - periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas kredit / pembiayaan secara individual.
- *Exposure at default* ("EAD") – Perusahaan mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit / pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data kredit/piutang pembiayaan selama minimal tiga tahun. Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debit kredit/pembiayaan pada posisi laporan dengan *probability default* (PD), *loss identification period* (LIP) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat aset keuangan pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan. Pada saat kerugian penurunan nilai diakui, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah kerugian penurunan nilai dengan menggunakan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto estimasi arus kas masa datang pada saat menghitung penurunan nilai.

Penurunan nilai menurut PSAK terbaru ini juga dijelaskan dalam Buletin Teknis Nomor 4 tentang Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 & PSAK 55 (Revisi 2006) yang dibuat oleh IAI. Berdasarkan Buletin Teknis dijelaskan bahwa pada saat awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006), entitas menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006). Jika entitas menentukan penurunan nilai tidak di awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006), maka entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Ada beberapa metode dan analisis yang dapat perusahaan pakai dalam menghitung cadangan penurunan piutang, antara lain *roll-rate model*, *average charge-off method*, *migration analysis* dan *vintage analysis*. Metode yang secara umum dipakai oleh perusahaan pembiayaan dalam menghitung cadangan penurunan piutang pembiayaan yang dinilai secara kolektif, antara lain:

#### 1. *Roll-Rate Model*

Metode ini menggunakan periode waktu masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (*roll rate average*) dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan. Hal-hal yang tidak mencerminkan penurunan nilai pada pinjaman yang ada saat ini dan mungkin juga tidak mencerminkan keadaan ekonomi saat ini.

Tabel 2.1. Ilustrasi perhitungan menggunakan metode *Roll-Rate Model*

<b>Loss Provision (LP)</b>	<b>= EAD (<i>Exposure at Default</i>) X PD (<i>Profitability of Default</i>) X LGD (<i>Loss Given Default</i>)</b>
<b>LGD</b>	<b>= 1 - <i>discounted recovery rate</i></b>
<b>EAD</b>	<b>= Nilai piutang berdasarkan umur piutang</b>

Month/Year	Current	1-30 days	31-60 days	61-180 days	181-365 days	>365 days
Jan-10	30%	50%	58%	68%	88%	100%
Feb-10	25%	45%	60%	69%	90%	100%
Mar-10	28%	50%	61%	70%	90%	100%
Apr-10	32%	52%	63%	66%	90%	100%
Mei-10	18%	51%	55%	65%	92%	100%
Jun-10	25%	43%	54%	66%	93%	100%
Jul-10	30%	50%	58%	68%	88%	100%
Agust-10	30%	50%	58%	68%	88%	100%
Sep-10	29%	48%	50%	63%	95%	100%
Okt-10	30%	43%	52%	64%	90%	100%
Nop-10	32%	42%	53%	65%	83%	100%
Des-10	27%	48%	48%	66%	88%	100%
Average	28%	48%	56%	67%	90%	100%

Time Bucket	Probability Default (PD) 31 Dec 2010
Current	4% = 28% x 48% x 56% x 67% x 90% x 100%
1-30 days	16% = 48% x 56% x 67% x 90% x 100%
31-60 days	33% = 56% x 67% x 90% x 100%
61-180 days	60% = 67% x 90% x 100%
181-365 days	90% = 90% x 100%
>365 days	100% = 100%

Sumber: Hasil olahan Penulis

Untuk dapat menghitung penurunan nilai piutang menggunakan metode *roll rate average*, kita harus memiliki daftar umur piutang setiap bulan minimal satu tahun terakhir (contoh tabel 2.1). Dari daftar umur piutang setiap bulan yang dimiliki, dapat diketahui berapa persentase perpindahan atau pergerakan umur piutang. Penurunan umur piutang setiap bulannya kita diubah menjadi persentase sehingga kita mendapatkan persentase perpindahan umur piutang selama setahun. Terbentuklah rata-rata persentase perpindahan untuk setiap umur piutang (contoh tabel 2.1). *Profitability of Default (PD)* untuk setiap umur piutang dihasilkan dari perkalian rata-rata persentase perpindahan umur piutang. *Loss Provision (LP)* didapat dari perkalian nilai piutang sesuai umur piutang dikali PD dikali LGD. Apabila tidak tersedia informasi berapa *discounted recovery rate*, maka LGD dapat diasumsikan 100%.

## 2. Average Charge-Off Method

Metode ini memperhitungkan tingkat kerugian pinjaman historis berdasarkan x-tahun (sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir) dan menentukan rata-rata tingkat kerugian pinjaman historis yang relevan selama x-tahun. Kerugian pinjaman historis yang relevan didapat dari total penurunan nilai piutang tahun berjalan dikurangi dengan pemulihan nilai piutang. Nilai bersih kerugian pinjaman setiap tahun lalu dibagi dengan nilai piutang tahun berjalan menghasilkan persentase penurunan piutang terhadap nilai piutang. Persentase penurunan piutang selama minimal 3 (tiga) tahun terakhir kemudian dirata-rata untuk menghasilkan persentase penurunan nilai kolektif tahun berjalan. Perusahaan pembiayaan harus melakukan review tahunan terhadap table “*default loss*” dan menentukan penyesuaian yang harus dilakukan selanjutnya yang diperlukan karena perubahan faktor-faktor ekonomi.

Tabel 2.2. Ilustrasi perhitungan metode *Average Charge-Off Method*

Year	2000	2001	2002	2003	2004	5 Years Average %
Actual Loan Written Off	98.300.000	89.900.000	78.300.000	66.500.000	54.500.000	
Recoveries	(20.300.000)	(19.800.000)	(18.700.000)	(16.000.000)	(12.800.000)	
Net Loan Written Off (A)	78.000.000	70.100.000	59.600.000	50.500.000	41.700.000	
Total Loan Base	7.802.400.000	7.506.700.000	7.502.000.000	7.802.700.000	7.705.800.000	
Average Loan Base (B)	7.802.400.000	7.654.550.000	7.504.350.000	7.652.350.000	7.754.250.000	
Historical Loan						
Loan Rate (A)/(B)	0,999692%	0,915795%	0,794206%	0,659928%	0,537770%	0,781478%

Year 2005				
Gross Loan Base (A)	Gross Loans that are individually impaired (B)	Adjusted Loan Base (C) = (A) - (B)	Historical Loan Loss Rate (%) (D)	Collective Impairment (E) = (C) x (D)
7.705.800.000	(206.800.000)	7.499.000.000	0,781478%	58.603.053

Sumber: Hasil olahan Penulis

## 2.4 Penelitian Sebelumnya

Pada tahun 2011, Andrić *et al* (2011) melakukan penelitian dengan judul *Financial Reporting and Characteristics of Impairment of Assets in The Republic According to IAS/IFRS and National Regulation*. Penelitian ini menyajikan karakteristik penurunan nilai aset di Republik Serbia pada periode 2007-2009. Penelitian tersebut didasarkan pada sampel dari 225 laporan keuangan perusahaan berukuran besar dan menengah di Republik Serbia untuk periode 2007-2009.

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang mengungkapkan kerugian penurunan nilai, serta peningkatan nilai kerugian penurunan nilai, di mana piutang merupakan bagian terbesar dalam struktur aset yang mengalami penurunan nilai. Andrić *et al* (2011) juga menyatakan bahwa salah satu persyaratan penting dari pelaporan keuangan adalah bahwa nilai tercatat dari aset yang diungkapkan dalam laporan keuangan tidak boleh melebihi jumlah yang dapat terpulihkan. Jika nilai tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, baik dengan penggunaan atau penjualan aset, maka nilai tercatat harus dikurangi. Ini berarti bahwa aset tercatat tidak melebihi jumlah terpulihkan. Penurunan nilai tercatat untuk mewakili nilai yang dapat direalisasikan diakui sebagai rugi penurunan nilai.

Perusahaan tidak harus mengukur jumlah terpulihkan aset apabila tidak ada indikasi bahwa nilai tercatat aset mungkin terganggu. Pengecualian untuk aturan ini mengacu pada aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dan aset tidak berwujud yang belum siap digunakan harus diuji atas penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Pengecualian ini dibuat karena penentuan nilai wajar aset tidak berwujud dan *goodwill* cukup sulit dihitung karena karakteristiknya.

Menurut Andrić *et.al* (2011), setiap jumlah kerugian penurunan nilai harus diakui dan dinyatakan di laporan laba rugi untuk setiap periode yang dilaporkan, dengan indikasi dimana kerugian penurunan nilai tersebut diklasifikasikan dalam laporan laba rugi (misalnya, sebagai bagian dari depresiasi, biaya lain-lain, biaya

operasional atau biaya lainnya). Jumlah dari setiap pemulihan penurunan nilai yang tahun sebelumnya telah diakui juga harus diungkapkan, sekali lagi dengan identifikasi dimana dalam laporan laba rugi nilai tersebut telah diklasifikasikan. Informasi ini juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam penelitiannya, Andrić *et al* (2011) menjabarkan bahwa atas penurunan nilai atas suatu aset, perusahaan harus mengungkapkan penurunan nilai yang diakui di tahun berjalan dan nilai yang terpulihkan di tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- a) Kejadian dan keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pemulihan rugi penurunan nilai.
- b) Jumlah kerugian penurunan nilai diakui atau terpulihkan.
- c) Untuk aset individu harus diungkapkan sifat dari aset dan jika entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi segmen sesuai dengan IFRS 8, di segmen mana aset itu berada.
- e) Jika jumlah yang dapat dipulihkan adalah nilai yang wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, dasar apa yang digunakan untuk menentukan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual (seperti apakah nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar yang aktif).
- f) Jika jumlah yang dapat dipulihkan adalah nilai yang digunakan, berapa tingkat diskonto yang digunakan dalam estimasi saat ini dan perkiraan sebelumnya (jika ada)

Dalam penelitian terhadap karakteristik dari pengungkapan penurunan nilai aset pada Perusahaan di Republik Serbia didasarkan pada 225 sampel laporan keuangan perusahaan berukuran besar dan menengah untuk periode 2007-2009, karakteristik pengungkapan yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a) Persentase perusahaan yang diungkapkan penurunan nilai aset
- b) Persentase perusahaan yang mengungkapkan informasi tambahan mengenai penurunan yang signifikan aset.

Dilihat dari dampak ekonomi dan kinerja perusahaan, penelitian ini memperlihatkan peningkatan jumlah persentase perusahaan yang mengungkapkan kerugian penurunan nilai dimulai dari tahun 2007 hingga 2009 dan pengungkapan penurunan piutang memperoleh bagian terbesar. Jika dilihat dari segi pelaporan keuangan, penelitian ini menguji bagaimana keterbukaan informasi tambahan tentang penurunan nilai signifikan dari aset. Hasil penelitian mengenai persentase perusahaan di Republik Serbia yang mengungkapkan informasi tambahan tentang penurunan nilai aset yang signifikan dalam periode 2007-2009 adalah sebagai berikut:

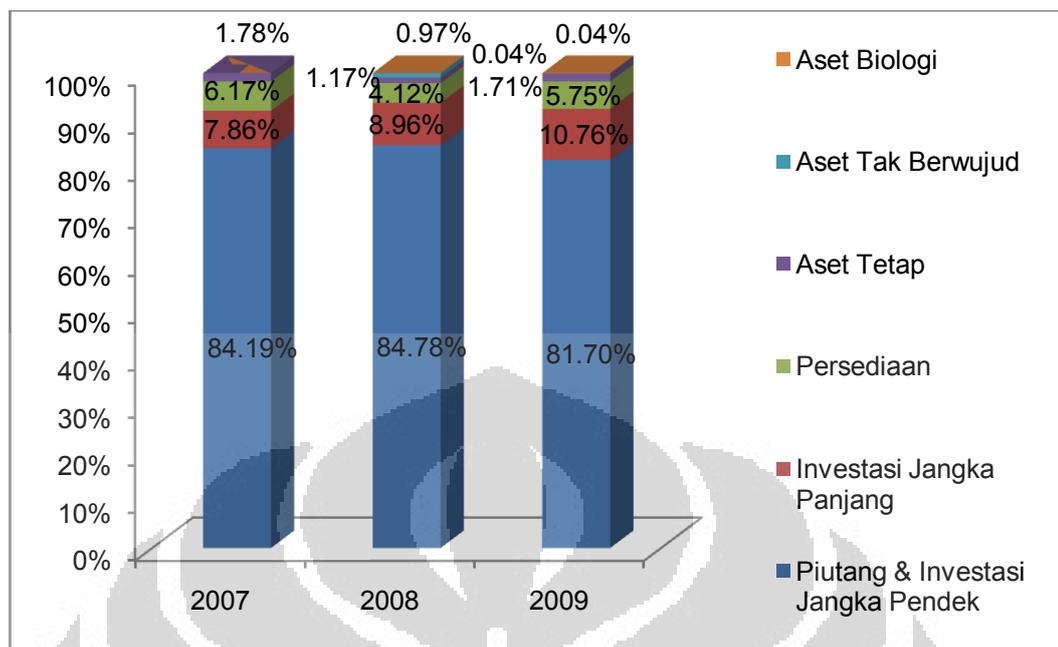
Tabel 2.3. Persentase perusahaan yang mengkapkan informasi tambahan tentang penurunan nilai signifikan dari aset di Republik Serbia di Periode 2007-2009

<b>Informasi Tambahan atas Penurunan Nilai</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Kejadian yang mempengaruhi penurunan nilai	12%	17%	18%
Sifat asset	12%	17%	18%
Jenis nilai yang dapat dipulihkan	8%	8%	9%
Metode penentuan nilai wajar	2%	4%	2%
Tingkat diskonto yang dipakai	0%	2%	2%

Sumber: Andrić *et al* (2011)

Penelitian ini membuktikan peningkatan jumlah perusahaan yang mengungkapkan informasi tambahan mengenai kejadian yang mempengaruhi penurunan nilai signifikan. Pada 2009, 18% dari perusahaan mengungkapkan informasi ini, sementara pada tahun 2008 dan 2007 persentase pengungkapannya adalah 17% dan 12%. Namun juga dapat diamati bahwa kualitas informasi yang diberikan tidak memuaskan dan perusahaan tidak mengungkapkan semua informasi yang ditetapkan oleh peraturan akuntansi. Sebagai contoh, hanya 18% perusahaan mengungkapkan penurunan nilai signifikan dari aset dan memberikan penjelasan tambahan. Dari jumlah itu, 9% perusahaan mengungkapkan penurunan nilai yang dapat dipulihkan dan hanya 2% perusahaan yang menjelaskan metode yang mereka pakai untuk menghitung penurunan nilai aset atau tingkat diskonto yang digunakan.

Gambar 2.5. Struktur Rugi Penurunan Republik Serbia pada Periode 2007-2009



Sumber: Andrić *et al* (2011)

Gambar 2.5. menunjukkan bahwa penurunan nilai sebagian besar timbul dari penurunan nilai akun piutang dan investasi jangka pendek yang meliputi 81,7% dari total aset pada tahun 2009. Berdasarkan struktur penurunan nilai di Negara Serbia tersebut, Penulis yakin bahwa akun piutang merupakan akun yang paling signifikan untuk diteliti mengenai penurunan nilai dan bagaimana pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kesimpulannya, berdasarkan investigasi oleh Andrić *et al* (2011) dari 225 laporan keuangan perusahaan di Republik Serbia pada periode 2007-2009, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang mengungkapkan penurunan nilai aset dan jumlah penurunan nilai dapat dikenali. Pada tahun 2009, 79% dari perusahaan mengungkapkan penurunan nilai aset, hal itu lebih tinggi dari tahun 2007 karena hanya 56% perusahaan. Rasio penurunan nilai dan jumlah aset yang mengalami penurunan menunjukkan peningkatan, dari 0,14% pada 2007 menjadi 1,87% pada tahun 2009. Peningkatan rugi penurunan nilai tersebut juga mempertimbangkan kondisi bisnis di Republik Serbia.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa kerugian penurunan nilai piutang usaha dan investasi jangka pendek memiliki partisipasi tertinggi dalam penurunan nilai total, diikuti oleh kerugian penurunan nilai panjang investasi jangka, kerugian penurunan nilai persediaan dan seterusnya. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa jumlah perusahaan yang mengungkapkan informasi tambahan tentang penurunan signifikan dari aset meningkat pada periode yang diamati, tetapi kualitas pengungkapan informasi tambahan masih belum memuaskan, perusahaan-perusahaan masih belum mengungkapkan informasi tambahan sesuai dengan persyaratan pengungkapan internasional dan regulasi Nasional.



## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian. Adapun metode-metode tersebut adalah:

##### 1. Studi Literatur

Studi ini dimaksudkan untuk melihat penelitian terdahulu tentang konsep akuntansi pencadangan penurunan nilai piutang, termasuk dalam studi ini adalah studi terkait dengan praktik akuntansi perusahaan pada akun pencadangan penurunan nilai aset di Negara lain yang diperoleh dari literatur berupa jurnal.

##### 2. Analisis data (*data analysis*)

Studi ini dimaksudkan dengan melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan semua perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan membandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini secara khusus apakah telah menerapkan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) pada akun pencadangan penurunan nilai piutang pembiayaan.

Dalam pengolahan data, penulis pertama-tama akan mengolah data mentah dalam *Microsoft Excel*, yaitu statistik deskriptif, yang berhubungan dengan meringkas data yang diobservasi, mendeskripsikan data lalu menghasilkan kesimpulan.

##### 3.1.1 Metode Pemilihan Sampel

Data penelitian yang utama adalah laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan audit atas perusahaan-perusahaan *multifinance* yang terdiri dari informasi kuantitatif dan kualitatif. Informasi lainnya yang dapat digunakan seperti data-data umur piutang, metode perhitungan penurunan piutang dan estimasi yang digunakan perusahaan serta data yang tersedia di buku-buku, artikel majalah,

artikel surat kabar serta informasi dari publikasi elektronik lainnya yang berhubungan dengan penelitian juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Setiap data dan informasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diungkapkan seluruhnya dalam daftar referensi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (sebelum penerapan) dan 2010 (setelah penerapan). Ukuran perusahaan tidak dijadikan pertimbangan untuk pengambilan sampel. Karena keterbatasan akses dan informasi yang dimiliki penulis, dari total 12 populasi perusahaan pembiayaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dapat dilihat pada tabel 3.1., ada 2 perusahaan pembiayaan yang laporan keuangan tahun 2010-nya tidak berhasil penulis dapatkan, yaitu PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (BPFI) dan PT Indo Citra Finance Tbk (INCF). Karena keterbatasan tersebut maka dua perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai sampel penelitian ini.

Selain itu ada pula perusahaan yang baru memulai penawaran saham perdana di BEI pada tahun 2011, yaitu PT HD Finance Tbk dan PT Tifa Finance Tbk. Penulis tetap memasukkan kedua perusahaan tersebut kedalam sampel, tetapi secara khusus hanya melakukan penelitian terhadap penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) untuk tahun 2010 tanpa melakukan perbandingan dengan laporan keuangan tahun 2009.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini diharapkan telah dapat mewakili populasi dari industri pembiayaan karena sampel merupakan perusahaan-perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia yang wajib membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan pembiayaan anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi sampel bagi penelitian, yaitu:

Tabel 3.1. Nama Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 31 Desember 2010

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten	Tanggal Terdaftar di BEI
1.	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	CFIN	26 Juni 1989
2.	PT Buana Finance Tbk	BBLD	19 Maret 1990
3.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	BFIN	Tahun 1990
4.	PT Trust Finance Indonesia Tbk	TRUS	11 Februari 2002
5.	PT Adira Dinamika Multi Fin Tbk	ADMF	23 Maret 2004
6.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	WOMF	30 November 2004
7.	PT Mandala Multifinance Tbk	MFIN	06 September 2005
8.	PT Verena Multi Finance	VRNA	13 Juni 2008
9.	PT HD Finance Tbk	HDFA	12 Januari 2011
10.	PT Tifa Finance Tbk	TIFA	30 Juni 2011

Sumber: Hasil olahan penulis

### 3.1.2 Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan *website*. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang digunakan sebagai landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk data yang sifatnya kuantitatif, pengumpulannya datanya per tahun (akhir tahun).

Dalam melakukan pengambilan data, penulis menggunakan sumber data sekunder yang merupakan data yang sudah dipublikasikan melalui beberapa situs *online* perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Data tersebut berupa laporan tahunan yang di dalamnya terdapat laporan audit (*audited report*) serta informasi tambahan lainnya atas perusahaan sampel sebelum penerapan PSAK 50 & 55 revisi 2006 (laporan keuangan tahun 2009) dan setelah penerapan PSAK 50 & 55 revisi 2006 (laporan keuangan tahun 2010).

## 3.2 Metode Analisis

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis komparatif terhadap sampel laporan akuntansi keuangan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran mengenai penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) pada perusahaan *multifinance* dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun pencadangan penurunan piutang pembiayaan. Selain itu, analisis ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai konsekuensi yang timbul dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap kinerja perusahaan karena adanya perhitungan cadangan penurunan piutang pembiayaan. Pada setiap perusahaan yang menjadi sampel, penulis akan membandingkan kenaikan atau penurunan cadangan piutang pembiayaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) dan bagaimana perusahaan menyajikan cadangan penurunan nilai piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Analisis dilanjutkan dengan melihat laporan keuangan masing-masing perusahaan di industri *multifinance* yang meliputi kebijakan akuntansi serta bagaimana perusahaan menyajikan informasi tambahan atas cadangan penurunan nilai piutang pembiayaan. Dibagian terakhir, akan disajikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) khususnya bagi perusahaan *multifinance* di Indonesia.

## 3.3 Riset

### 3.3.1 Riset / Analisis Nilai Piutang

Pertama-tama penelitian ini akan melihat berapa persentase piutang terhadap aset pada perusahaan pembiayaan. Apabila nilai persentase piutang terhadap aset besar maka adanya penurunan piutang memberikan pengaruh yang signifikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Kegiatan utama perusahaan pembiayaan sebagai lembaga keuangan non-bank adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam pengadaan barang dan lainnya. Tidak tertagihnya

piutang adalah resiko utama perusahaan. Penurunan nilai akan menghasilkan pengungkapan nilai wajar sebuah piutang yang diharapkan akan tertagih di masa yang akan datang. Tetapi secara langsung akan menambah beban perusahaan karena kerugian penurunan piutang akan menjadi beban pada laporan laba rugi komprehensif. Akan dijabarkan pula berapa komposisi piutang yang berasal dari kegiatan sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan anjak piutang.

### 3.3.2 Riset / Analisis Hasil Penyajian

Dalam penelitiannya, informasi yang ingin diketahui adalah sejauh mana pengungkapan dan penyajian penurunan nilai suatu piutang pembiayaan dilihat dari semua komponen laporan keuangan, antara lain:

#### 1. Laporan posisi keuangan

PSAK No. 1 (revisi 2009) mengenai Penyajian Laporan Keuangan tidak mengatur cara apa yang harus dipakai perusahaan dalam menyajikan piutang di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memilih bagaimana cara menyajikan piutang pembiayaan dan cadangan penurunan nilai piutang pada laporan posisi keuangan, dapat secara *net* ataupun secara *gross*. Yang terpenting adalah cara tersebut dapat secara komunikatif memberikan informasi bagi pembacanya. Apabila disajikan secara *net*, perusahaan harus memberikan informasi tambahan berupa jumlah nilai pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui ditambah cadangan penurunan nilai piutang.

Berikut ini adalah dua contoh penyajian akun piutang pembiayaan konsumen dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang memadai dalam laporan posisi keuangan pada perusahaan pembiayaan:

Tabel 3.2. Contoh penyajian piutang pembiayaan konsumen dan cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>	<b>(Disajikan dalam ribuan Rupiah)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>Disajikan secara net</b>		
...		
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi pendapatan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.122.916.000 ribu tahun 2010 dan Rp 1.661.708.000 ribu tahun 2009	3.162.620.000	2.089.523.000
...		
<b>Disajikan secara gross</b>		
...		
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian yang dibiayai bank	5.285.536.000	3.751.231.000
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	<u>(2.059.262.000)</u>	<u>(1.611.189.000)</u>
Piutang pembiayaan konsumen	3.226.274.000	2.140.042.000
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(63.654.000)</u>	<u>(50.519.000)</u>
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.162.620.000	2.089.523.000
...		

Sumber: Hasil olahan Penulis

## 2. Laporan laba rugi komprehensif

- a) Beban penurunan nilai piutang pembiayaan tahun berjalan diklasifikasikan dimana (misalnya, sebagai bagian dari beban depresiasi, beban lain-lain dan sebagainya).
- b) Pemulihan penurunan nilai piutang pembiayaan tahun berjalan diklasifikasikan dimana (misalnya, pendapatan lain-lain, beban kerugian nilai dan sebagainya).

PSAK No. 50 (revisi 2006) mengenai Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan menyatakan bahwa jumlah kerugian dan pemulihan nilai aset keuangan yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Pada setiap tanggal neraca Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau pinjaman yang diberikan dan piutang mengalami penurunan nilai. Jika

terdapat indikasi penurunan nilai, perusahaan harus membuat penyesuaian penurunan nilai aset keuangan dalam hal ini piutang.

Pada laporan laba rugi komprehensif, penelitian ini mencoba melihat dimana cadangan penurunan nilai dan pemulihan penurunan nilai piutang pembiayaan diklasifikasikan. Selain pengklasifikasian pada laporan laba rugi komprehensif, penelitian ini juga coba mengidentifikasi apakah Perusahaan juga telah mengungkapkan pengklasifikasian beban kerugian dan pemulihan penurunan nilai tersebut pada catatan atas laporan keuangan.

"Jumlah kerugian penurunan nilai" yang diakui di laba rugi setiap periode harus diungkapkan, dengan indikasi di mana dalam laporan laba rugi telah diklasifikasikan (misalnya, sebagai bagian dari depresiasi atau pada biaya lainnya). Begitu pula untuk jumlah dari setiap pemulihan penurunan nilai yang sebelumnya diakui juga harus diungkapkan, sekali lagi dengan identifikasi di mana dalam laporan laba rugi ini telah dimasukkan.

Jika pada akhir periode pelaporan, perusahaan mendapatkan indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau mungkin mengalami penurunan, Perusahaan harus memperkirakan dan memperhitungkan jumlah pemulihan penurunan nilai piutang. Dalam menilai apakah penurunan nilai sebelumnya harus dibatalkan, perusahaan harus memperoleh informasi baik dari sumber eksternal dan internal.

Berikut ini adalah contoh dari pengungkapan yang memadai dari penurunan nilai piutang dalam laporan laba rugi komprehensif pada perusahaan pembiayaan dan informasi lain yang relevan dengan penurunan nilai:

Tabel 3.3. Contoh Pengungkapan Penurunan dan Pemulihan Nilai Piutang dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penjelasan atas Informasi Signifikan

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	(Disajikan dalam ribuan Rupiah)	
	2010	2009
<b>PENDAPATAN</b>		
Pembiayaan konsumen	177.767.438	123.199.016
Administrasi	45.570.508	38.201.084
Bunga	6.873.200	6.890.970
<b>Pendapatan lain-lain</b>	<b>54.264.617</b>	<b>69.546.618</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	...	...
<b>BEBAN</b>		
Bunga dan keuangan	100.289.928	76.857.979
Gaji dan tunjangan	44.767.438	41.701.530
<b>Cadangan penurunan nilai piutang</b>	<b>34.155.288</b>	<b>24.199.016</b>
Umum dan administrasi	17.988.897	15.576.829
Iklan dan promosi	1.570.508	1.106.274
Beban lain-lain	16.873.200	14.264.617
<b>JUMLAH BEBAN</b>	...	...
...		
<b>Penjelasan atas Informasi Signifikan</b>		
Pasar uang dan pasar modal global telah mengalami ketidakstabilan dan krisis kredit yang parah. Kemampuan pelanggan Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usaha dan mempertahankan tingkat profitabilitas serta untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo mungkin sangat tergantung pada efektivitas kebijakan fiskal dan tindakan lainnya yang dilakukan untuk mencapai pemulihan ekonomi, yang berada diluar kendali mereka.		

Sumber: Hasil olahan Penulis

### 3. Laporan perubahan ekuitas

Penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) memberikan dampak pada penyajian nilai di ekuitas. Di awal penerapan, penyisihan penurunan nilai piutang diakui sebagai pengurang ekuitas. Sedangkan untuk selanjutnya, penurunan nilai piutang diakui langsung dalam laporan laba rugi. Oleh sebab itu pada laporan keuangan tahun 2010, Perusahaan harus menyajikan saldo per 1 Januari 2010 setelah penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006). Penelitian ini akan melihat apakah Perusahaan sampel telah menyajikan penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) pada laporan keuangan tahun 2010. Tabel 3.4. adalah contoh penyajian penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006).

Tabel 3.4. Contoh Penyajian laporan perubahan ekuitas sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)

	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor - Bersih	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas - Bersih
			Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
...					
<b>Saldo 31 Desember 2009</b>	<b>380.170.000.000</b>	<b>357.906.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>793.094.000.000</b>	<b>1.534.170.000.000</b>
Penyesuaian terkait dengan penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006)	-	-	-	103.909.000.000	103.909.000.000
Saldo pada tanggal 1 Januari 2010 setelah penyesuaian terkait penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006)	380.170.000.000	357.906.000.000	3.000.000.000	897.003.000.000	1.638.079.000.000
Dividen tunai tahun 2009	-	-	-	(59.306.000.000)	(59.306.000.000)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	362.077.000.000	362.077.000.000
Penggunaan saldo laba untuk cadangan umum	-	-	3.000.000.000	(3.000.000.000)	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010	<b>380.170.000.000</b>	<b>357.906.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>1.196.774.000.000</b>	<b>1.940.850.000.000</b>

Sumber: Hasil olahan Penulis

#### 4. Catatan atas laporan keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan, CALK disajikan informatif yang menjelaskan kebijakan dan praktik akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan secara spesifik menjelaskan akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif. Laporan keuangan harus menyajikan hasil transaksi setiap periode dan memberikan informasi yang benar dan adil tentang posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas. Berbagai kejadian bisa terjadi dalam periode pelaporan, salah satunya adalah kejadian yang menyebabkan penurunan nilai piutang. Keterbukaan informasi pada laporan keuangan sangatlah penting sebagaimana tercantum dalam peraturan akuntansi, perusahaan harus mengungkapkan informasi tambahan untuk setiap penurunan nilai yang signifikan. Beberapa item yang akan diteliti antara lain:

##### a) Kebijakan Akuntansi

Bagaimana Perusahaan mengungkapkan prinsip dan praktek akuntansi penurunan nilai piutang pembiayaan pada kebijakan akuntansi aset keuangan.

##### b) Penjelasan Akun

Penulis ingin melihat apakah Perusahaan telah mengungkapkan informasi sebagai berikut:

##### - Metode perhitungan penurunan nilai piutang pembiayaan

Sesuai PSAK 60 paragraf 9.c.1, perusahaan mengungkapkan metode alternatif yang diyakini entitas lebih menggambarkan jumlah perubahan nilai wajar.

##### - Daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo

Sesuai PSAK 60 paragraf 38, perusahaan mengungkapkan informasi mengenai kualitas kredit baik yang belum jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo. Daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo membantu perusahaan dan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui rencana penerimaan arus kas masa depan. Tabel 3.5. adalah contoh daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo pada laporan keuangan perusahaan.

Tabel 3.5. Contoh daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo

<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>		<b>(Disajikan dalam jutaan Rupiah)</b>	
Angsuran piutang pembiayaan konsumen - bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:			
		<b>2010</b>	<b>2009</b>
< 1 tahun		22,435,356	15,216,844
1 - 2 tahun		11,848,546	7,485,735
> 2 tahun		5,177,983	2,732,655
<b>Jumlah piutang pembiayaan konsumen – bruto</b>		<b>39,461,885</b>	<b>25,435,234</b>

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Sampel

- Daftar umur piutang - sesuai jumlah hari tunggakan

Daftar umur piutang - sesuai jumlah hari tunggakan membantu perusahaan mengidentifikasi adanya kemungkinan piutang tak tertagih dilihat dari lama waktu seorang customer menunggak. Tabel 3.6. adalah contoh yang memadai daftar umur piutang - sesuai jumlah hari tunggakan pada laporan keuangan perusahaan.

Tabel 3.6. Contoh daftar umur piutang - sesuai jumlah hari tunggakan

<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>		<b>(Disajikan dalam jutaan Rupiah)</b>	
Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen – bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:			
		<b>2010</b>	<b>2009</b>
Tidak ada tunggakan		32,070,782	20,810,837
1-90 hari		6,901,993	4,383,561
91-120 hari		154,171	76,020
121-180 hari		237,838	117,050
> 180 hari		97,101	47,766
<b>Piutang pembiayaan konsumen - bruto</b>		<b>39,461,885</b>	<b>25,435,234</b>

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Sampel

- Mutasi perhitungan cadangan penurunan piutang

Sesuai PSAK 60 paragraf 29c, untuk pengukuran nilai wajar, perusahaan harus mengungkapkan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir dan entitas harus mengungkapkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama periode berjalan. Penelitian ini akan melihat apakah perusahaan telah menyajikan mutasi perhitungan cadangan penurunan piutang. Mutasi perhitungan cadangan penurunan piutang memberikan informasi berapa jumlah penambahan dan pemulihan cadangan selama tahun berjalan, penghapusan piutang serta beberapa penyesuaian yang terkait. Tabel 3.7. adalah contoh yang memadai atas mutasi / perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan perusahaan.

Tabel 3.7. Contoh Mutasi / Perubahan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	(Disajikan dalam ribuan Rupiah)	
	2010	2009
<b>Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai</b>		
Saldo awal per 1 Januari	172.094.000	109.069.000
Penambahan cadangan selama tahun berjalan	1.457.000	65.000.000
Pembalikan cadangan selama tahun berjalan	(1.396.000)	-
Penghapusan piutang	(15.931.000)	(1.975.000)
Penyesuaian terkait dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	(91.159.000)	-
Reklasifikasi ke cadangan penurunan nilai agunan yang diambil alih	(950.000)	-
<b>Saldo akhir per 31 Desember</b>	<b>64.115.000</b>	<b>172.094.000</b>

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Sampel

- Penyajian dampak penerapan PSAK 55 (revisi 2006) pada perhitungan cadangan penurunan piutang

PSAK 55 (revisi 2006) mengubah cara perusahaan dalam mengukur penurunan nilai aset keuangan tergantung pada klasifikasi instrumen

keuangan. PSAK ini diterapkan secara prospektif, penerapan awal tidak memiliki pengaruh atas jumlah yang dilaporkan di tahun 2009. Kerugian penurunan nilai aset keuangan yang timbul akibat penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) dibebankan ke saldo laba sesuai dengan Buletin Teknis No. 4, Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 & 55 (revisi 2006).

- Kejadian atau informasi signifikan yang mempengaruhi penurunan nilai  
Kejadian atau informasi signifikan yang mempengaruhi penurunan nilai merupakan salah satu hal yang sangat penting tetapi sangat sering diabaikan pengungkapannya oleh manajemen perusahaan. Selain itu kualitas informasi yang diberikan juga harus diperhatikan agar apa yang ditangkap pengguna laporan keuangan sesuai dengan keadaan aktual perusahaan.

c) Manajemen Resiko

Sesuai dengan PSAK No. 60 (revisi 2010) mengenai Instrumen Keuangan: Pengungkapan, paragraph 33 bahwa Perusahaan mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas resiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan berfokus pada resiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana resiko tersebut telah dikelola. Resiko ini umumnya meliputi, tetapi tidak terbatas pada, resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko pasar.

## BAB 4

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Nilai Piutang

Berikut ini adalah posisi keuangan yang meliputi total aset, total piutang dan persentase piutang dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 pada perusahaan pembiayaan yang menjadi sampel penelitian:

Tabel 4.1. Persentase piutang terhadap aset perusahaan pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2010 & 2009

No	Kode Emiten	Total Aset	Total Piutang	% Piutang Terhadap Aset
1.	<b>CFIN</b>			
	2010	2.693.909.989.000	2.631.719.832.000	97,69%
	2009	1.771.266.800.000	1.668.805.117.000	94,22%
2.	<b>BBLD</b>			
	2010	1.582.725.831.794	1.538.836.370.567	97,23%
	2009	1.370.730.188.537	1.301.368.551.016	94,94%
3.	<b>BFIN</b>			
	2010	3.870.091.000.000	3.391.414.000.000	87,63%
	2009	2.392.980.000.000	2.296.474.000.000	95,97%
4.	<b>TRUS</b>			
	2010	261.958.772.993	246.290.145.987	94,02%
	2009	189.904.604.782	188.674.076.762	99,35%
5.	<b>ADMF</b>			
	2010	7.599.615.000.000	6.739.947.000.000	88,69%
	2009	4.329.549.000.000	2.603.027.000.000	60,12%
6.	<b>WOMF</b>			
	2010	3.598.701.000.000	3.226.274.000.000	89,65%
	2009	2.572.820.000.000	2.140.042.000.000	83,18%
7.	<b>MFIN</b>			
	2010	3.128.916.164.309	2.888.015.948.425	92,30%
	2009	2.057.703.096.837	1.828.061.240.161	88,84%
8.	<b>VRNA</b>			
	2010	961.243.997.000	857.512.112.000	89,21%
	2009	643.464.580.000	605.008.785.000	94,02%
9.	<b>HDFA</b>			
	2010	764.433.946.000	746.678.106.000	97,68%
	2009	612.969.534.000	594.776.815.000	97,03%
10.	<b>TIFA</b>			
	2010	741.472.420.000	737.891.540.000	99,52%
	2009	415.203.635.000	412.580.847.000	99,37%

Sumber: Hasil olahan penulis

Dari tabel 4.1. terlihat bahwa nilai piutang-kotor memiliki persentase yang paling besar dibandingkan aset lainnya dalam komponen aset di laporan posisi keuangan perusahaan pembiayaan. Persentase total piutang sewa pembiayaan ditambah piutang pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang masing-masing adalah 93,36% dan 92,23% dibandingkan total aset pada tahun 2010 dan 2009. Hal ini menunjukkan bahwa nilai piutang sangat berpengaruh terhadap nilai aset perusahaan. Adanya isu mengenai penurunan nilai piutang juga akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan aset perusahaan pembiayaan.

Dari tabel 4.2. terlihat bahwa kegiatan utama perusahaan pembiayaan paling banyak adalah bidang pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen antara lain: pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan. Penelitian ini akan lebih berfokus pada piutang dan penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen untuk melihat implikasi penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada perusahaan pembiayaan.

#### **4.2 Analisis Hasil Penyajian**

Dalam penelitian mengenai penerapan PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006) terhadap penurunan piutang pada perusahaan pembiayaan, Penulis mengambil 10 (sepuluh) sampel laporan keuangan perusahaan pembiayaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010 dan 2009. Berikut ini akan dibahas satu persatu bagaimana piutang pembiayaan, cadangan penurunan nilai piutang dan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) disajikan mulai dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal hingga catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini adalah nilai piutang untuk masing-masing kegiatan perusahaan pembiayaan yang menjadi sampel penelitian:

Tabel 4.2. Jumlah piutang masing-masing kegiatan pada perusahaan pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009

No	Kode Perusahaan	Sewa Pembiayaan		Pembiayaan Konsumen		Anjak Piutang	
		2010	2009	2010	2009	2010	2009
1.	CFIN	942.027.524.000	894.367.342.000	1.120.477.395.000	504.092.716.000	569.214.913.000	270.345.059.000
2.	BBLD	1.037.957.329.344	910.854.016.668	487.145.314.547	374.145.314.547	13.733.726.676	16.369.219.801
3.	BFIN	520.596.000.000	208.215.000.000	2.870.818.000.000	2.088.259.000.000	-	-
4.	TRUS	-	-	246.290.145.987	188.674.076.762	-	-
5.	ADMF	-	-	6.739.947.000.000	2.603.027.000.000	-	-
6.	WOMF	-	-	3.226.274.000.000	2.140.042.000.000	-	-
7.	MFIN	-	-	2.888.015.948.425	1.828.061.240.161	-	-
8.	VRNA	-	-	857.512.112.000	605.008.785.000	-	-
9.	HDFA	-	-	746.678.106.000	594.776.815.000	-	-
10.	TIFA	675.422.597.000	351.902.620.000	55.293.670.000	54.209.288.000	7.175.273.000	6.468.939.000

Sumber: Hasil olahan Penulis

#### 4.2.1 Analisis Penyajian pada Laporan Posisi Keuangan

Perusahaan dapat menyajikan piutang pembiayaan secara *gross* (nilai piutang pembiayaan kotor dikurangi penurunannya) atau *net* (nilai piutang pembiayaan bersih). Dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) mengenai Penyajian Laporan Keuangan tidak diatur cara apa yang harus dipakai perusahaan dalam menyajikan piutang.

Tabel 4.3. Penyajian piutang pembiayaan dan cadangan penurunan nilai pada laporan posisi keuangan tahun 2010 dan 2009

No	Kode Perusahaan	2010	2009
1.	CFIN	<i>Net</i>	<i>Net</i>
2.	BBLD	<i>Gross</i>	<i>Gross</i>
3.	BFIN	<i>Net</i>	<i>Gross</i>
4.	TRUS	<i>Net</i>	<i>Net</i>
5.	ADMF	<i>Net</i>	<i>Net</i>
6.	WOMF	<i>Gross</i>	<i>Gross</i>
7.	MFIN	<i>Net</i>	<i>Net</i>
8.	VRNA	<i>Net</i>	<i>Net</i>
9.	HDFA	<i>Gross</i>	<i>Gross</i>
10.	TIFA	<i>Gross</i>	<i>Gross</i>

Sumber: Hasil olahan Penulis

Setiap perusahaan dapat memilih bagaimana cara menyajikan piutang pembiayaan dan cadangan penurunan nilai piutang pada laporan posisi keuangan yang menurut perusahaan paling informatif. Pada tabel 4.3. kita dapat melihat bahwa masing-masing 6 dan 5 perusahaan pada tahun 2010 dan 2009 memilih menyajikan piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan secara *net* atau nilai piutang pembiayaan disajikan bersih. Selain itu terdapat masing-masing 5 perusahaan untuk tahun 2010 dan 2009 yang memilih menyajikan piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan secara *gross* atau menyajikan piutang pembiayaan kotor dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan penurunan nilai piutang.

Terdapat 1 perusahaan yang mengubah cara penyajian piutang pembiayaan, secara *gross* di 2009 menjadi secara *net* di 2010, yaitu BFIN. Tidak dijelaskan secara khusus dalam laporan keuangan tahun 2010 alasan perusahaan mengubah cara penyajian piutang pembiayaan. Pada tahun 2010 dan 2009, BFIN diaudit oleh kantor akuntan publik yang sama tetapi dengan *signing partner* yang berbeda. Menurut analisis penulis, perubahan cara penyajian piutang pembiayaan mungkin terjadi karena ada perbedaan kebijakan antara satu *signing partner* dengan *signing partner* lainnya. Selain 1 perusahaan tersebut, semua perusahaan sampel secara konsisten mempergunakan cara penyajian yang sama untuk tahun 2010 dan 2009.

Penyajian piutang pembiayaan secara *net* yang memadai adalah dengan memberikan informasi tambahan berupa jumlah nilai pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui ditambah cadangan penurunan nilai piutang. Dari hasil penelaahan laporan keuangan, masing-masing 6 dan 5 perusahaan pada tahun 2010 dan 2009 yang menyajikan piutang pembiayaan secara *net* telah memberikan informasi berapa nilai pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui ditambah cadangan penurunan nilai piutang pada laporan posisi keuangan.

#### **4.2.2 Analisis Penyajian pada Laporan Laba Rugi Komprehensif**

Pada laporan laba rugi komprehensif, penelitian ini mencoba melihat dimana cadangan penurunan nilai dan pemulihan penurunan nilai piutang pembiayaan diklasifikasikan. Selain pengklasifikasian pada laporan laba rugi komprehensif, penelitian ini juga coba mengidentifikasi apakah perusahaan juga telah mengungkapkan pengklasifikasian beban kerugian dan pemulihan penurunan nilai tersebut pada catatan atas laporan keuangan.

Tabel 4.4. Klasifikasi beban dan pemulihan penurunan piutang pada perusahaan pembiayaan tahun 2010 dan 2009

No.	Kode Perusahaan	Klasifikasi beban penurunan piutang	Klasifikasi pemulihan penurunan piutang
1.	CFIN	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang
2.	BBLD	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang
3.	BFIN	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang
4.	TRUS	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang
5.	ADMF	Beban	Pendapatan lain-lain
6.	WOMF	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang
7.	MFIN	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang
8.	VRNA	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang
9.	HDFA	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang
10.	TIFA	Beban	<i>Net-off</i> beban penurunan piutang

Sumber: Hasil olahan Penulis

#### **Klasifikasi & pengungkapan di CALK atas beban penurunan nilai piutang**

Dari tabel 4.4. terlihat bahwa ke-10 sampel perusahaan pembiayaan mengklasifikasikan cadangan penurunan nilai piutang ke dalam komponen beban pada laporan laba rugi komprehensif tahun 2010 dan 2009. Total beban akan menjadi pengurangi total pendapatan. Semua perusahaan sampel mengungkapkan pengklasifikasian beban penurunan nilai piutang di catatan atas laporan keuangan (CALK) secara tidak spesifik. Perusahaan hanya menginformasikan bahwa beban penurunan nilai piutang diakui di laba rugi, tanpa menyebutkan di bagian mana penurunan nilai dibebankan.

#### **Klasifikasi & pengungkapan di CALK atas pemulihan penurunan nilai piutang**

Dari tabel 4.4. terdapat 9 perusahaan di tahun 2010 dan 2009 mengklasifikasikan pemulihan penurunan nilai piutang sebagai pengurang beban

cadangan penurunan piutang. Hanya ada 1 perusahaan, yaitu ADMF di tahun 2010 dan 2009 yang mengklasifikasikan pemulihan penurunan nilai piutang sebagai komponen pendapatan lain-lain. ADMF adalah satu-satunya perusahaan dari 10 perusahaan sampel yang diaudit KAP KPMG. Perbedaan pengklasifikasian pemulihan penurunan nilai piutang dikarenakan kebijakan perusahaan.

Tabel 4.5. Pengungkapan klasifikasi pemulihan penurunan nilai piutang pada CALK

Pengklasifikasian	2010 dan 2009
Dijelaskan secara spesifik	1 Perusahaan
Dijelaskan tetapi tidak spesifik	8 Perusahaan
Tidak dijelaskan	1 Perusahaan

Dijelaskan secara spesifik	: CALK menjelaskan ke akun mana pemulihan penurunan nilai piutang diklasifikasikan di laporan laba rugi
Dijelaskan tetapi tidak spesifik	: CALK hanya menjelaskan bahwa pemulihan penurunan nilai piutang diakui di laba rugi, tanpa menjelaskan ke komponen mana pemulihan diklasifikasikan
Tidak dijelaskan	: Perusahaan sama sekali tidak memberikan informasi berkaitan dengan klasifikasi pemulihan penurunan nilai pada CALK

Sumber: Hasil olahan Penulis

Dari Tabel 4.5. terlihat bahwa hanya 1 perusahaan yang **menjelaskan secara spesifik** pengungkapan klasifikasi pemulihan penurunan nilai piutang, yaitu ADMF. ADMF adalah satu-satunya perusahaan yang mengklasifikasikan pemulihan penurunan nilai kedalam akun pendapatan lain-lain dan satu-satunya perusahaan dari 10 perusahaan sampel yang diaudit KAP KPMG.

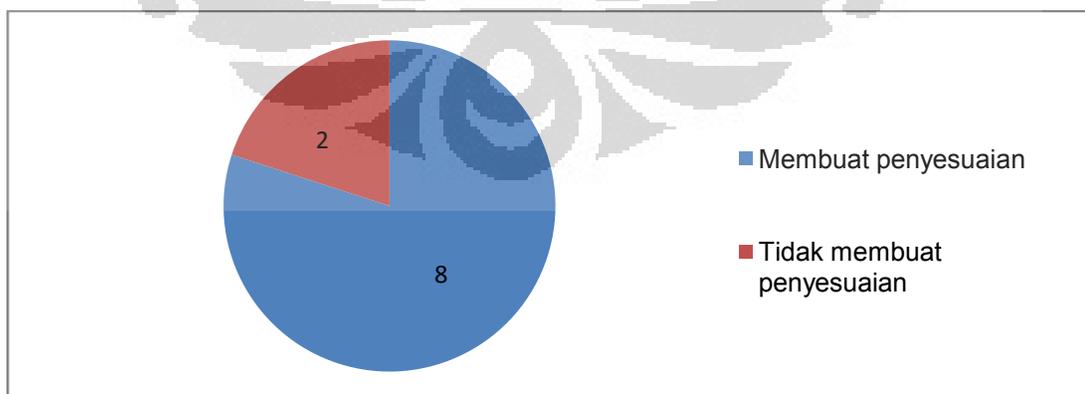
Ada 8 perusahaan yang **menjelaskan tetapi tidak spesifik** pengungkapan klasifikasi pemulihan penurunan nilai piutang. Perusahaan tersebut hanya mengungkapkan bahwa pemulihan penurunan nilai piutang diakui di laba rugi tanpa menyebutkan di bagian mana diklasifikasikan.

Dan ada 1 perusahaan, yaitu BBLD yang **tidak menjelaskan** pengungkapan klasifikasi pemulihan penurunan nilai piutang. BBLD diaudit oleh KAP EY yang termasuk salah satu KAP *big four*. Dalam penelitian ini ada 2 perusahaan sampel lain yang juga diaudit oleh KAP EY dan menjelaskan pengungkapan klasifikasi pemulihan penurunan nilai piutang.

#### 4.2.3 Analisis Penyajian pada Laporan Perubahan Ekuitas di Laporan Keuangan tahun 2010

Pada gambar 4.1. terlihat bahwa 8 perusahaan pembiayaan yang *listed* di BEI sudah melakukan penyesuaian terkait penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) tahun 2010. Sedangkan 2 perusahaan sampel belum melakukan penyesuaian terkait penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) tahun 2010. Pada catatan atas laporan keuangan tidak dijelaskan alasan mengapa kedua perusahaan tersebut tidak melakukan penyesuaian awal terkait penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) tahun 2010. Kedua perusahaan yang belum melakukan penyesuaian terkait penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) tahun 2010 adalah HDFA yang diaudit oleh KAP EY dan TIFA yang diaudit oleh KAP Moore Stephan.

Gambar 4.1. Penyajian penyesuaian penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2010



Sumber: Hasil olahan Penulis

Pada tabel 4.6 dapat terlihat mutasi penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen yang salah satu komponennya adalah penyesuaian terkait dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Pada kebijakan akuntansi di CALK, kedua perusahaan tersebut menyebutkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2010 telah mengadopsi PSAK No. 50 & 55 (Revisi 2006) yang dilakukan secara prospektif. Tetapi dalam kenyataannya kedua perusahaan tersebut, HDFA dan TIFA, belum melakukan penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006).

#### 4.2.4 Analisis Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

##### a) Kebijakan Akuntansi

##### **Kebijakan Akuntansi: Instrumen Keuangan**

Pada tabel 4.8. terlihat bahwa hanya 2 perusahaan dari 10 perusahaan sampel yang sangat spesifik mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan perusahaan. Kedua perusahaan tersebut yaitu, CFIN dan VRNA, mengungkapkan lebih dari 8 poin pengungkapan dan diaudit oleh KAP Deloitte, salah satu *big four auditors*. Menurut eksplorasi penulis atas laporan keuangan perusahaan sampel, didapatkan bahwa pengungkapan mengenai akuntansi instrumen keuangan atas perusahaan yang diaudit oleh KAP Deloitte memiliki pengungkapan yang paling lengkap dan spesifik dibandingkan perusahaan lain.

Sisanya terdapat 8 perusahaan yang cukup spesifik mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan karena mengungkap 4 sampai 7 poin pengungkapan. Perusahaan-perusahaan tersebut diaudit oleh beberapa kantor akuntan independen yang memiliki afiliasi internasional, baik *big four auditors* ataupun *non big four auditors*.

Tabel 4.6 Tabel mutasi penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen

Keterangan	CFIN	BBLD	BFIN	TRUS	ADMF
Saldo awal	9.610.351.000	9.430.054.368	172.094.000.000	10.279.717.192	41.113.000.000
Penambahan cadangan selama tahun berjalan	18.474.215.000	3.626.478.418	1.457.000.000	544.774.163	193.466.000.000
Pemulihan cadangan selama tahun berjalan	-	-	(1.396.000.000)	-	-
Penghapusan piutang	(9.161.930.000)	(2.326.613.552)	(15.931.000.000)	-	(121.528.000.000)
Penyesuaian terkait dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	(5.934.904.000)	(4.761.256.398)	(91.159.000.000)	(6.547.101.159)	83.070.000.000
Pendapatan bunga atas bagian yang tidak mengalami penurunan nilai	(609.491.000)	(197.714.991)	-	-	-
Reklasifikasi ke cadangan penurunan nilai agunan yang diambil alih	-	-	(950.000.000)	-	-
<b>Penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen</b>	<b>12.378.241.000</b>	<b>5.770.947.845</b>	<b>64.115.000.000</b>	<b>4.277.390.196</b>	<b>196.121.000.000</b>

Keterangan	WOMF	MFIN	VRNA	HDFA	TIFA
Saldo awal	50.519.000.000	31.821.967.169	14.662.198.000	5.518.335.000	4.971.511.000
Penambahan cadangan selama tahun berjalan	91.167.000.000	33.459.086.666	353.496.000	24.199.016.000	99.719.000
Pemulihan cadangan selama tahun berjalan	-	-	8.295.266.000	-	(3.415.000.000)
Penghapusan piutang	(93.020.000.000)	(23.969.628.162)	(6.766.323.000)	(22.589.000.000)	(253.381.000)
Penyesuaian terkait dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	14.988.000.000	(10.844.023.405)	(42.248.000)	-	-
Pendapatan bunga atas bagian yang tidak mengalami penurunan nilai	-	-	(315.385.000)	-	-
Reklasifikasi ke cadangan penurunan nilai agunan yang diambil alih	-	-	-	-	-
<b>Penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen</b>	<b>63.654.000.000</b>	<b>30.467.402.268</b>	<b>16.187.004.000</b>	<b>7.128.351.000</b>	<b>1.402.849.000</b>

Sumber: Hasil olahan penulis

Tabel 4.7 Kebijakan Akuntansi Instrumen Keuangan

No	Kode Perusahaan	Kebijakan Akuntansi Instrumen Keuangan
1.	CFIN	1. Kategori Aset dan Liabilitas Keuangan, 2. Metode suku bunga efektif, 3. Penurunan nilai aset keuangan, 4. Penghentian pengakuan aset dan Liabilitas keuangan, 5. Reklasifikasi aset keuangan, 6. Instrumen ekuitas, 7. Saling Hapus Instrumen Keuangan, 8. Nilai wajar instrumen keuangan.
2.	BBLD	1. Pengakuan awal, 2. Pengukuran setelah pengakuan awal, 3. Kategori Aset dan Liabilitas Keuangan, 4. saling hapus instrumen keuangan, 5. Nilai wajar instrumen keuangan, 6. penurunan nilai aset keuangan, 7. penghentian pengakuan aset dan kewajiban keuangan
3.	BFIN	1. Kategori Aset dan Liabilitas Keuangan, 2. Penentuan nilai wajar, 3. Penghentian pengakuan, 4. Saling hapus instrumen keuangan, 5. penurunan nilai aset keuangan,
4.	TRUS	1. Klasifikasi, 2. Pengakuan, 3. Penghentian pengakuan, 4. Saling hapus, 5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi, 6. Pengukuran nilai wajar
5.	ADMF	1. Klasifikasi, 2. Pengakuan, 3. Penghentian pengakuan, 4. Saling hapus, 5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi, 6. Pengukuran nilai wajar
6.	WOMF	1. Pengakuan & pengukuran aset keuangan, 2. penghentian pengakuan aset keuangan, 3. penurunan nilai aset keuangan, 4. Kewajiban keuangan
7.	MFIN	1. Pengakuan & pengukuran aset keuangan, 2. penghentian pengakuan aset keuangan, 3. penurunan nilai aset keuangan, 4. Kewajiban keuangan, 5. Instrumen derivatif
8.	VRNA	1. Metode suku bunga efektif, 2. Kategori Aset & Liabilitas keuangan, 3. Penurunan nilai aset keuangan, 4. Nilai wajar instrumen keuangan, 5. Penghentian pengakuan, 6. Reklasifikasi aset keuangan, 7. Saling hapus instrumen keuangan, 8. Instrumen ekuitas
9.	H DFA	1. Pengakuan awal, 2. pengukuran setelah pengakuan awal, 3. saling hapus nilai wajar, 4. nilai wajar instrumen keuangan, 5. biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan, 6. penurunan nilai aset keuangan, 7. penghentian pengakuan aset dan kewajiban keuangan
10.	TIFA	1. Penentuan Nilai Wajar, 2. Kategori Aset & Liabilitas keuangan, 3. Saling Hapus Instrumen Keuangan, 4. Penurunan nilai aset keuangan, 5. Penghentian pengakuan Aset & Liabilitas keuangan

Sumber: Hasil olahan penulis

Tabel 4.8. Pengungkapan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan perusahaan pembiayaan tahun 2010

No	Kode Perusahaan	Kategori	Jumlah Poin Pengungkapan
1.	CFIN	Sangat Spesifik	8
2.	BBLD	Cukup Spesifik	7
3.	BFIN	Cukup Spesifik	5
4.	TRUS	Cukup Spesifik	6
5.	ADMF	Cukup Spesifik	6
6.	WOMF	Cukup Spesifik	4
7.	MFIN	Cukup Spesifik	5
8.	VRNA	Sangat Spesifik	8
9.	H DFA	Cukup Spesifik	7
10.	TIFA	Cukup Spesifik	5

**Poin-poin pengungkapan pada kebijakan akuntansi instrumen keuangan:**

1. Kategori instrumen keuangan; 2. Pengakuan awal 3. Pengukuran setelah pengakuan awal; 4. Saling hapus instrumen keuangan; 5. Pengukuran nilai wajar; 6. Biaya perolehan diamortisasi/metode suku bunga efektif; 7. Penurunan nilai; 8. Reklasifikasi; 9. Penghentian pengakuan; 10. Penjelasan kebijakan instrumen keuangan tambahan

**Kategori penilaian pengungkapan:**

- 1. Sangat Spesifik : Menjelaskan lebih dari 8 poin pengungkapan
- 2. Cukup Spesifik : Menjelaskan 4-7 poin pengungkapan
- 3. Tidak Spesifik : Menjelaskan 0-3 poin pengungkapan

Sumber: Hasil olahan Penulis

**Kebijakan Akuntansi: Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai**

Pada tahun 2009, semua perusahaan sampel telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan terkait identifikasi dan pengukuran penurunan nilai piutang yang digunakan. Yang berbeda adalah cara pengungkapannya pada CALK, ada perusahaan yang mengungkapkan penurunan nilai piutang secara tersendiri adapula

yang digabung pada kebijakan akuntansi pembiayaan yang dimilikinya. Semua perusahaan mengungkapkan penurunan nilai piutang tersendiri, kecuali WOMF yang mengungkapkan penurunan nilai piutang digabung pada kebijakan akuntansi pembiayaan yang dimilikinya. Menurut pendapat Penulis, kedua cara tersebut dapat dipakai selama CALK terkait identifikasi dan pengukuran nilai diungkapkan secara informatif sehingga membantu pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan.

Sejak 1 Januari 2010 yaitu tanggal efektif penerapan PSAK 55 (revisi 2006), pada setiap tanggal neraca Perusahaan diharuskan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang pembiayaan sebagai kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan pinjaman yang diberikan dan piutang mengalami penurunan nilai. Berdasarkan penelaahan atas laporan keuangan, semua perusahaan sampel telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dipakainya secara tersendiri dan mengacu pada PSAK 55 (revisi 2006).

Dari 10 sampel yang diambil Penulis, ada 4 perusahaan yang berada dalam pengendalian bank, yaitu ADMF, CFIN, WOMF dan VRNA. Perusahaan dibawah pengendalian bank adalah perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali bank dan dikonsolidasi oleh induk perusahaan yang merupakan bank. Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan kerugian penurunan nilai piutang bagi ke 4 perusahaan di bawah pengendali bank dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007. Sejak 1 Januari 2010 yaitu tanggal efektif penerapan PSAK 55 (revisi 2006), perusahaan sampel sudah tidak menerapkan Peraturan Bank Indonesia tetapi mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa apakah piutang pembiayaan sebagai kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan pinjaman yang diberikan dan piutang mengalami penurunan nilai.

## b) Penjelasan Akun

Dibawah ini dapat dilihat bagaimana perusahaan sampel mengungkapkan berbagai informasi berkaitan dengan penurunan nilai piutang dan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006):

Tabel 4.9. Jumlah Perusahaan yang mengungkapkan informasi tambahan

Keterangan	2010	2009
Metode perhitungan penurunan nilai	6	4
Daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo	10	10
Daftar umur piutang - sesuai jumlah hari tunggakan	6	6
Mutasi / perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai	10	10
Penyajian dampak penerapan PSAK 55 (revisi 2006) pada perhitungan cadangan penurunan piutang	8	-
Kejadian atau informasi signifikan yang mempengaruhi penurunan nilai	2	3

Sumber: Hasil olahan Penulis

### Metode perhitungan penurunan nilai

Pada tabel 4.9. pada tahun 2009 ada 4 perusahaan, yaitu ADMF, CFIN, WOMF dan VRNA, yang mengungkapkan metode penurunan nilai yang dipakai. 4 perusahaan yang diatas berada dalam pengendalian bank sehingga mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dalam menghitung penurunan nilai piutang dan metode tersebut diungkapkan pada CALK.

Pada tahun 2010, 6 perusahaan mengungkapkan bahwa metode penurunan nilai piutang yang mereka pakai adalah secara kolektif. Dapat dilihat di tabel 4.10, dari 6 perusahaan, 2 perusahaan diantaranya yaitu, CFIN dan VRNA,

mengungkapkan secara spesifik penggunaan metode *Roll Rate Model* dalam menghitung penurunan nilai piutang secara kolektif. Seperti yang pernah diungkapkan pada halaman 53 skripsi ini, CFIN dan VRNA diaudit oleh KAP Deloitte, salah satu *big four auditors*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Deloitte memiliki pengungkapan yang paling lengkap dan spesifik dibandingkan perusahaan lain.

### **Daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo**

Dari tabel 4.9. dapat terlihat bahwa semua perusahaan sampel pada tahun 2010 dan 2009 telah menyajikan daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo. Daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo dapat membantu perusahaan dan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui rencana penerimaan arus kas masa depan.

### **Daftar umur piutang - sesuai jumlah hari tunggakan**

Dari tabel 4.9. dapat terlihat bahwa hanya 6 dari 10 perusahaan di tahun 2010 dan 2009 yang menyajikan daftar umur piutang - sesuai tanggal hari tunggakan. Tidak ada penjelasan signifikan pada CALK laporan keuangan audit mengapa perusahaan tidak menyajikan daftar umur piutang. Menurut analisis penulis, perusahaan menganggap bahwa daftar umur piutang sesuai tanggal jatuh tempo sudah cukup memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Daftar umur piutang - sesuai jumlah hari tunggakan akan sangat membantu perusahaan mengidentifikasi adanya kemungkinan piutang tak tertagih dilihat dari lama waktu seorang *customer* menunggak.

### **Mutasi / perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai**

Sama seperti pengungkapan informasi mengenai daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo, semua perusahaan sampel pada tahun 2010 dan 2009 telah

menyajikan mutasi perhitungan cadangan penurunan piutang. Mutasi perhitungan cadangan penurunan piutang perusahaan sampel dapat dilihat pada tabel 4.6.

PSAK 55 (revisi 2006) mengubah cara perusahaan dalam mengukur penurunan nilai aset keuangan tergantung pada klasifikasi instrumen keuangan. Karena PSAK ini diterapkan secara prospektif, penerapan awal tidak memiliki pengaruh atas jumlah yang dilaporkan di tahun 2009, kerugian penurunan nilai aset keuangan yang timbul akibat penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) dibebankan ke saldo laba sesuai dengan Buletin Teknis No. 4, Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006).

Hasil penelitian terhadap laporan keuangan perusahaan pembiayaan yang *listed* di BEI tahun 2010 menunjukkan bahwa 8 perusahaan dari 10 perusahaan sampel telah menyajikan dampak penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) pada perhitungan cadangan penurunan piutang dan membebankannya pada saldo laba yang mutasinya dapat dilihat pada laporan perubahan ekuitas.

### **Kejadian atau informasi signifikan yang mempengaruhi penurunan nilai**

Pada tahun 2009 identifikasi kata untuk mengungkapkan penurunan nilai adalah “penyisihan piutang ragu-ragu”. Sedangkan pada tahun 2010 identifikasi kata untuk mengungkapkan penurunan nilai adalah “Cadangan kerugian penurunan nilai” dan Pengukuran penurunan nilai”. Kejadian atau informasi signifikan yang mempengaruhi penurunan nilai merupakan salah satu hal yang sangat penting tetapi sangat sering diabaikan pengungkapannya oleh manajemen perusahaan. Pada tahun 2010 dan 2009, masing-masing 2 dan 3 perusahaan yang mengungkapkan informasi signifikan yang mempengaruhi penurunan nilai piutang. Perusahaan mengungkapkan bahwa adanya krisis global tahun 2009 memberikan resiko kredit bagi perusahaan yang mendorong adanya penurunan nilai piutang.

Tabel 4.10. Identifikasi kata dan metode penurunan nilai piutang

No.	Kode Perusahaan	Identifikasi Kata		Metode Penurunan Nilai	
		2010	2009	2010	2009
1.	CFIN	Cadangan kerugian penurunan nilai	Penyisihan piutang ragu-ragu	Kolektif – Roll Rate Model	Peraturan BI
2.	BBLD	Cadangan kerugian penurunan nilai	Penyisihan piutang ragu-ragu	X	X
3.	BFIN	Pengukuran penurunan nilai	Penyisihan piutang ragu-ragu	X	X
4.	TRUS	Pengukuran penurunan nilai	Penyisihan kerugian piutang	Kolektif	X
5.	ADMF	Penyisihan kerugian penurunan nilai	Penyisihan kerugian piutang	Kolektif	Peraturan BI
6.	WOMF	Penurunan nilai aset keuangan	Penyisihan piutang ragu-ragu	Kolektif	Peraturan BI
7.	MFIN	Penyisihan kerugian penurunan nilai	Penyisihan piutang ragu-ragu	Kolektif	X
8.	VRNA	Cadangan kerugian penurunan nilai	Penyisihan piutang ragu-ragu	Kolektif – Roll Rate Model	Peraturan BI
9.	HDFA	Penyisihan kerugian penurunan nilai	Penyisihan piutang ragu-ragu	X	X
10.	TIFA	Penyisihan kerugian penurunan nilai	Penyisihan piutang ragu-ragu	X	X

Sumber: Hasil olahan Penulis

### c) Manajemen Resiko

Pada penelitian terhadap 10 laporan keuangan tahun 2010 atas perusahaan pembiayaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia, dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa 6 perusahaan telah mengungkapkan manajemen resiko sesuai ketentuan minimum PSAK No. 60 (revisi 2010). Pengungkapan 6 perusahaan tersebut berfokus pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana resiko tersebut telah dikelola. Resiko ini umumnya meliputi, tetapi tidak terbatas pada, resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko pasar.

Tabel 4.11. Pengungkapan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan perusahaan pembiayaan tahun 2010

No	Kode Perusahaan	Kategori
1.	CFIN	Sangat lengkap
2.	BBLD	Lengkap
3.	BFIN	Sangat lengkap
4.	TRUS	Lengkap
5.	ADMF	Sangat lengkap
6.	WOMF	Lengkap
7.	MFIN	Lengkap
8.	VRNA	Sangat lengkap
9.	HDFA	Lengkap
10.	TIFA	Lengkap

**Kategori penilaian pengungkapan:**

1. Sangat lengkap : Menjelaskan resiko instrumen keuangan (resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko pasar) dan 4 (empat) pilar manajemen risiko
2. Lengkap : Menjelaskan resiko instrumen keuangan (resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko pasar)
3. Kurang lengkap : Menjelaskan kurang dari 3 resiko instrumen keuangan (resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko pasar)

Sumber: Hasil olahan Penulis

Selain itu dari tabel 4.11 terlihat bahwa ada 4 perusahaan yang secara lengkap mengungkapkan bagaimana manajemen resiko perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya menjelaskan resiko instrumen keuangan, tetapi juga menambahkan pengungkapan mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko. 4 (empat) pilar manajemen risiko yang menjadi pengungkapan tambahan antara lain:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan

Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran dan Pengawasan

Pilar 4: Pengendalian Internal

#### **4.3 Analisis Dampak penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada kinerja perusahaan**

Perubahan sebuah kebijakan pasti memberikan dampak bagi penggunaannya, begitu pula penerapan awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) yang efektif tanggal 1 Januari 2010 memberikan dampak pada laporan keuangan tahun 2010 bagi perusahaan yang menerapkannya. Pada analisis akhir di bab 4, kita dapat melihat dampak penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terhadap kinerja di laporan laba rugi komprehensif. Seperti yang kita ketahui, beban penurunan piutang akan dimasukkan ke laba rugi.

Penelitian berikut ini akan melihat apakah penerapan PSAK 55 (revisi 2006) akan meningkatkan atau menurunkan persentase beban cadangan penurunan piutang dari tahun 2009 ke 2010. Lebih jauh lagi penelitian ini akan melihat apakah kenaikan/penurunan persentase beban cadangan penurunan piutang memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai laba bersih perusahaan dari tahun 2009 ke 2010. Berikut ini adalah persentase kenaikan dan penurunan beban cadangan penurunan piutang dan persentasi kenaikan atau penurunan laba bersih perusahaan pembiayaan dari tahun 2009 ke 2010:

Tabel 4.12. Persentase kenaikan/penurunan beban cadangan penurunan piutang dan laba bersih dari tahun 2009 ke 2010

No.	Nama Perusahaan	Kenaikan/ (Penurunan) beban cadangan penurunan nilai piutang		Kenaikan/ (Penurunan) laba bersih	
		2010	2011	2010	2011
1.	CFIN	(80,60%)	36,95%	33,6%	27,35%
2.	BBLD	(151,45%)	(6,65%)	47,0%	36,32%
3.	BFIN	(99,79%)	-	20,1%	-
4.	TRUS	(68,87%)	41,34%	14,0%	12,71%
5.	ADMF	492,02%	135,88%	21,1%	7,14%
6.	WOMF	(51,35%)	86,56%	127,2%	(2455,82%)
7.	MFIN	130,13%	64,88%	22,7%	26,41%
8.	VRNA	(45,57%)	40,87%	59,7%	(5,11%)
9.	HDFA	121,96%	41,14%	13,0%	40,43%
10.	TIFA	(95,00%)	4010,80%	55,9%	28,17%

Sumber: Hasil olahan penulis

Pada tabel 4.12. terlihat bahwa penerapan PSAK 55 (revisi 2006) tahun 2010 memberikan dampak penurunan persentase beban cadangan penurunan piutang dari tahun 2009 ke 2010 bagi 7 perusahaan sekitar 45,57% hingga 151,45%. Sedangkan bagi 3 perusahaan lainnya, yaitu ADMF, MFIN dan HDFA, penerapan PSAK 55 (revisi 2006) tahun 2010 memberikan dampak kenaikan persentase beban cadangan penurunan piutang dari tahun 2009 ke 2010.

Laba bersih untuk semua perusahaan sampel dari tahun 2009 ke 2010 mengalami peningkatan dari 14% hingga 127,2%. Penurunan beban cadangan penurunan piutang dari tahun 2009 ke 2010 memberikan dampak pada kenaikan persentase laba bersih perusahaan. Tetapi penurunan beban cadangan penurunan piutang bukan merupakan satu-satunya penyebab kenaikan persentase laba bersih perusahaan. Masih banyak komponen yang menunjang kenaikan laba bersih perusahaan, seperti efisiensi pengeluaran, promosi, ekspansi perusahaan, peningkatan penjualan dan masih banyak lagi.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Persentase total piutang sewa pembiayaan ditambah piutang pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang masing-masing adalah 93,36% dan 92,23% dibandingkan total aset pada tahun 2010 dan 2009. Hal ini menunjukkan bahwa nilai piutang sangat berpengaruh terhadap nilai aset perusahaan. Adanya isu mengenai penurunan nilai piutang juga akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan aset perusahaan pembiayaan. Penelitian ini berfokus pada piutang dan penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen untuk melihat implikasi penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada perusahaan pembiayaan.

##### **5.1.1 Penyajian Penurunan Piutang Pembiayaan pada Laporan Posisi Keuangan**

Terdapat 1 perusahaan yang mengubah cara penyajian piutang pembiayaan, secara gross di 2009 menjadi secara net di 2010, yaitu BFIN. Menurut analisa penulis, perubahan cara penyajian piutang pembiayaan terjadi karena ada perbedaan kebijakan antara satu signing partner dengan signing partner lainnya walaupun masih dalam satu Kantor Akuntan Publik Independen yang sama. Selain 1 perusahaan tersebut, semua perusahaan sampel secara konsisten mempergunakan cara penyajian yang sama untuk tahun 2010 dan 2009. Perusahaan-perusahaan yang menyajikan piutang pembiayaan secara net juga telah memberikan informasi berapa nilai pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui ditambah cadangan penurunan nilai piutang pada laporan posisi keuangan.

### **5.1.2 Penyajian Penurunan Piutang Pembiayaan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif**

Ke-10 sampel perusahaan pembiayaan mengklasifikasikan cadangan penurunan nilai piutang kedalam komponen beban pada laporan laba rugi komprehensif tahun 2010 dan 2009. Semua perusahaan sampel mengungkapkan pengklasifikasian beban penurunan nilai piutang di catatan atas laporan keuangan (CALK) secara tidak spesifik. Perusahaan hanya menginformasikan bahwa beban penurunan nilai piutang diakui di laba rugi, tanpa menyebutkan di bagian mana penurunan nilai dibebankan.

Terdapat 9 Perusahaan di tahun 2010 dan 2009 mengklasifikasikan pemulihan penurunan nilai piutang sebagai pengurang beban cadangan penurunan piutang. Hanya 1 Perusahaan, yaitu ADMF di tahun 2010 dan 2009 yang mengklasifikasikan pemulihan penurunan nilai piutang sebagai komponen pendapatan lain-lain. ADMF adalah satu-satunya perusahaan dari 10 perusahaan sampel yang diaudit KAP KPMG.

### **5.1.3 Penyajian Penurunan Awal PSAK 55 (revisi 2006) pada Laporan perubahan ekuitas di laporan keuangan tahun 2010**

Terdapat 8 perusahaan pembiayaan yang listed di BEI sudah melakukan penyesuaian terkait penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) tahun 2010. Sedangkan 2 perusahaan sampel belum melakukan penyesuaian terkait penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) tahun 2010. Pada kebijakan akuntansi di CALK, kedua perusahaan tersebut menyebutkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2010 telah mengadopsi PSAK No. 50 & 55 (Revisi 2006) yang dilakukan secara prospektif. Tetapi dalam kenyataannya kedua perusahaan tersebut, HDFA dan TIFA, belum melakukan penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006).

#### **5.1.4 Pengungkapan Kebijakan dan Prinsip Penurunan Piutang pada Catatan atas Laporan Keuangan**

Pada laporan keuangan tahun 2010 terdapat 2 perusahaan dari 10 perusahaan sampel yang sangat spesifik mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan perusahaan. Kedua perusahaan tersebut yaitu, CFIN dan VRNA, mengungkapkan lebih dari 8 item pengungkapan dan diaudit oleh KAP Deloitte, salah satu big four auditors. Sisanya terdapat 8 perusahaan yang cukup spesifik mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan karena mengungkap 4 sampai 7 item pengungkapan. Perusahaan-perusahaan tersebut di audit oleh beberapa kantor akuntan independen yang memiliki afiliasi internasional, baik big four auditors ataupun non big four auditors.

Pada laporan keuangan tahun 2009, Semua perusahaan mengungkapkan penurunan nilai piutang tersendiri, kecuali WOMF yang mengungkapkan penurunan nilai piutang digabung pada kebijakan akuntansi pembiayaan yang dimilikinya.

Pada tahun 2009 ada 4 perusahaan yang berada dalam pengendalian bank, yaitu ADMF, CFIN, WOMF dan VRNA. Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan kerugian penurunan nilai piutang bagi ke 4 perusahaan dibawah pengendali bank dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007.

Sejak 1 Januari 2010 yaitu tanggal efektif penerapan PSAK 55 (revisi 2006), ke-10 perusahaan sampel sudah tidak menerapkan Peraturan Bank Indonesia tetapi mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa apakah piutang pembiayaan sebagai kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan pinjaman yang diberikan dan piutang mengalami penurunan nilai.

Pada tahun 2009 ada 4 perusahaan yang mengungkapkan metode penurunan nilai yang dipakai karena 4 perusahaan yang berada dalam pengendalian bank. 6 perusahaan lainnya tidak menjelaskan secara signifikan metode apa yang dipakai untuk menghitung penurunan nilai.

Pada tahun 2010, 6 dari 10 perusahaan mengungkapkan bahwa metode penurunan nilai piutang yang mereka pakai yaitu secara kolektif. Dari 6 perusahaan, 2 perusahaan mengungkapkan secara spesifik penggunaan metode *Roll Rate Model* dalam menghitung penurunan nilai piutang secara kolektif. Kedua perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Deloitte, salah satu *big four auditors*. Perusahaan yang di audit oleh KAP Deloitte memiliki pengungkapan yang paling lengkap dan spesifik dibandingkan perusahaan lain.

Semua perusahaan sampel pada tahun 2010 dan 2009 telah menyajikan daftar umur piutang - sesuai tanggal jatuh tempo. Terdapat 6 dari 10 perusahaan di tahun 2010 dan 2009 menyajikan daftar umur piutang - sesuai tanggal hari tunggakan. Tidak ada penjelasan signifikan pada CALK laporan keuangan audit mengapa perusahaan tidak menyajikan daftar umur piutang. Menurut analisa penulis, perusahaan menganggap bahwa daftar umur piutang sesuai tanggal jatuh tempo sudah cukup memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Semua perusahaan sampel pada tahun 2010 dan 2009 telah menyajikan mutasi perhitungan cadangan penurunan piutang. 8 perusahaan dari 10 perusahaan sampel telah menyajikan dampak penerapan PSAK 55 (revisi 2006) pada perhitungan cadangan penurunan piutang dan membebankannya pada saldo laba yang mutasinya dapat dilihat pada laporan perubahan ekuitas.

Pada tahun 2010 dan 2009, masing-masing 2 dan 3 perusahaan yang mengungkapkan informasi signifikan yang mempengaruhi penurunan nilai piutang. Perusahaan mengungkapkan bahwa adanya krisis global tahun 2009 memberikan resiko kredit bagi perusahaan yang mendorong adanya penurunan nilai piutang.

Pada penelitian terhadap 10 laporan keuangan tahun 2010, 6 perusahaan telah mengungkapkan manajemen resiko sesuai ketentuan minimum PSAK No. 60 (revisi 2010). Pengungkapan 6 perusahaan tersebut berfokus pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana resiko tersebut telah dikelola. Resiko ini umumnya meliputi, tetapi tidak terbatas pada, resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko pasar. Selain itu terdapat 4 perusahaan yang secara lengkap mengungkapkan bagaimana manajemen resiko perusahaan, tidak hanya menjelaskan resiko instrumen keuangan, tetapi juga menambahkan pengungkapan mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen resiko.

#### **5.1.5 Dampak Penerapan PSAK 55 (revisi 2006) Pada Kinerja Perusahaan**

Penurunan beban cadangan penurunan piutang dari tahun 2009 ke 2010 memberikan dampak pada kenaikan persentase laba bersih perusahaan. Tetapi penurunan beban cadangan penurunan piutang bukan merupakan satu-satunya penyebab kenaikan persentase laba bersih perusahaan. Masih banyak komponen yang menunjang kenaikan laba bersih perusahaan, seperti efisiensi pengeluaran, promosi, ekspansi perusahaan, peningkatan penjualan dan masih banyak lagi.

Penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan serta disiplin pasar sesuai dengan standar internasional yang berlaku saat ini. Selain itu, penerapan kedua standar akuntansi secara tepat dan konsisten mendorong perusahaan pembiayaan bisa membuat laporan keuangan secara lebih wajar dan informatif.

## **5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap beberapa pihak yang berkepentingan bagi perusahaan pembiayaan antara lain:

## 1. Kepada Asosiasi Industri Pembiayaan

PSAK 55 (revisi 2006) masih belum menjelaskan bagaimana penerapan dan implementasi penurunan nilai secara khusus di industri pembiayaan. Untuk industri perbankan, ada pedoman khusus yaitu tersebut diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang menjadi acuan semua bank di Indonesia. Saran kepada Asosiasi Industri Pembiayaan adalah membuat Pedoman Penurunan Nilai di Perusahaan Pembiayaan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia dalam menghitung dan menyajikan penurunan nilai piutang. Dengan adanya pedoman ini, perusahaan pembiayaan dapat memiliki standar pelaporan keuangan sehingga mempermudah pembaca menganalisa dan membandingkan laporan keuangan.

## 2. Kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Penulis juga ingin memberikan saran kepada pembuat peraturan baik DSAK selaku pembuat standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam PSAK 55 hanya disebutkan bahwa jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai yang signifikan secara individu terhadap suatu aset keuangan maka penilaiannya dilakukan secara individual. Adapun untuk aset keuangan sejenis yang tidak signifikan secara individual maupun yang tidak mengalami penurunan nilai, penilaiannya dilakukan secara kolektif. Namun, dalam PSAK tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai metode-metode yang dapat digunakan dalam penilaian impairment seperti metode DCF, *migration analysis* atau *roll rates model*.

Industri pembiayaan tidak mempunyai regulasi lain selain PSAK, ada kemungkinan terjadi salah penafsiran dalam perhitungan nilai impairment sehingga mungkin dibutuhkan penjelasan yang lebih rinci dalam Buletin Teknis. Buletin teknis yang diterbitkan oleh DSAK dapat berupa Pedoman Akuntansi pada Perusahaan Pembiayaan.

### **3. Kepada Manajemen Perusahaan**

Pihak perusahaan memberikan setiap anggota manajemennya pelatihan-pelatihan tentang penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) yang diadakan oleh institusi seperti IAI atau institusi akuntansi lainnya. Karyawan perusahaan yang telah mendapat pelatihan implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) tentu saja akan sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, pihak perusahaan juga harus melakukan *cost and benefit analysis* yang mungkin timbul jika ada perubahan sistem IT.

### **4. Kepada Auditor**

Penulis juga memberikan saran kepada pihak auditor untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan tentang PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh institusi akuntansi. Selain itu, auditor juga harus selalu berkomunikasi dengan baik kepada pihak perusahaan mengenai permasalahan dalam penerapan PSAK terbaru ini agar tidak ada kesalahan dalam analisis data. Juga dikarenakan proses audit yang terkait PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan beban kerja yang cukup berat, auditor harus pintar membagi waktu serta tenaga untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu.

### **5. Penelitian berikutnya**

Penelitian ini terbatas hanya pada 10 perusahaan dari 12 perusahaan yang ada. Penelitian ini juga hanya terbatas untuk akun penurunan nilai piutang. Saran bagi penelitian berikutnya adalah agar dapat mengeksplorasi akun-akun di laporan keuangan yang mengalami dampak perubahan peraturan terbaru.

## DAFTAR REFERENSI

- Arens, Alvin A, Randal J. Elder & Mark S. Beasley. (2009). *Auditing and Assurance Services- An Integrated Approach*. Singapore: Prentice Hall.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (Juni 2011). *Laporan Keuangan 2010 Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta: Pencipta.
- Bank Indonesia. (2005). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum"*. Jakarta: Pencipta.
- Bank Indonesia. (2006). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum"*. Jakarta: Pencipta.
- Bank Indonesia. (2007). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum"*. Jakarta: Pencipta.
- Dewey, John. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Los Angeles: Indo-European.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). *Buletin Teknis Nomor 4 tentang Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 & PSAK 55 (Revisi 2006)*. Jakarta: Pencipta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *Peraturan Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008*. Jakarta: Pencipta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan - PSAK 50 (revisi 2006). Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan - PSAK 55 (revisi 2006). Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: Salemba Empat.

Ismail. (2009). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.

Jones, L. (1988). *Competitor cost analysis at Caterpillar*. Management Accounting (US), October, 32±38.

Kementrian Keuangan. (2006). *Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan*. Jakarta: Pencipta.

Andrić, Mirko, Kristina Mijić & Dejan Jakšić. (2011). *Financial Reporting And Characteristics Of Impairment Of Assets In The Republic According To IAS/IFRS And National Regulation*. Economic Annals, Volume LVI, No. 189.

Wahlen, James M. (1994). *The Nature of Information in Commercial Bank Loan Loss Disclosures*. Chapel Hill: University of North Carolina.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/dampak-psak-5055-pencatatan-pendapatan-dan-laba-bersih-multifinance-turun-1>

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)